

**Membangun Ekonomi Indonesia:**

**PENGEMBANGAN KARAKTER**

**DAN**

**PATRIOTISME**

Orasi Ilmiah Memperingati

Dies Natalis Ke-45 Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Yogyakarta, 18 September 2010

Oleh:

SRI-EDI SWASONO

FISE - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**2010**

**Membangun Ekonomi Indonesia:**

**PENGEMBANGAN KARAKTER DAN PATRIOTISME**

**Oleh : Sri-Edi Swasono**

**Assalamu’alaikum Wr. Wb.**

Saudara Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Yth,

Saudara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Yth,

Para Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi Yth,

Para Dosen dan Asisten yang saya cintai,

Para Alumni yang membanggakan,

Para Civitas Akademika yang berbahagia,

Para Hadirin yang saya muliakan,

Pertama-tama saya mengucapkan Selamat kepada Keluarga Besar Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, yang merayakan Dies Natalis-nya ke-45. Semoga Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta ini tetap Berjaya dan terus memajukan diri untuk mencetak sarjana-sarjana yang tangguh, kompeten, nasionalistik dan patriotik.

Mengenai perlunya pengembangan karakter bagi anak bangsa kita, terutama dalam kaitannya dengan upaya membentukkan rasa cinta Tanah Air, memelihara kebersamaan dan semangat kekeluargaan, tentulah Ki Hajar Dewantara menjadi rujukan utama kita. Ibaratnya, siapapun yang mengenyam pendidikan Tamansiswa, maka dapatlah diharapkan ia menjadi seorang nasionalis yang mengemban budi luhur. Bila kita sepakat bahwa pendidikan (dan

pengajaran) dapat membentuk karakter, maka Tamansiswa-nya Ki Hajar Dewantara adalah contoh konkrit yang membuktikan kebenaran adagium pendi­dikan yang demikian ini.

Namun pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan pendapat Prof. Dr. Slamet Iman Santoso, salah seorang tokoh pendidikan nasional, Ketua Komisi Pendidikan Nasional (Komisi-21) di tahun 1970-an yang menjadi kebanggaan Universitas Indonesia.

Selaras dengan Ki Hajar Dewantara, Prof. Slamet Iman Santoso menegaskan bahwa tugas utama pendidikan adalah membina watak, membangun karakter. Lebih khusus dari itu ditegaskannya bahwa tujuan pendidikan yang murni ialah menyusun harga-pribadi atau *intrinsieke waarde* yang kukuh­kuat dalam jiwa pelajar. Kalau tujuan pendidikan ini tidak dipegang dengan teguh maka pendidikan itu merupakan pendidikan setengah-setengah dan dengan demikian bercacat. Pendidikan yang murni mempunyai sifat-sifat seperti membuat besi-baja yang tulen, biji besi harus dipanaskan, dituang, dipande, dipilih, yang buruk dibuang, yang baik diolah dan dipande ulang sampai diperoleh baja murni. Nyatalah tugas guru tidaklah mudah. 1)

1. Selanjutnya Prof. Slamet Iman Santoso mentransformasi pandangannya mengenai pendidikan nasional spesifik: (I) mengembangkan semua bakat dan kemampuan seorang, ke arah sifat-sifat perwatakan pandai dan terampil, jujur, berdisiplin, mengetahui kemampuan dan batas kemampuan pribadi serta mempunyai rasa kehormatan diri; (2) menempatkan bangsa Indonesia pada tempat terhormat dalam pergaulan antar bangsa sedunia. Sifat-sifat perwatakan yang dikemukakan Prof. Slamet Iman Santoso pada butir (1) haruslah diemban dengan watak berani *(courageous)* tanpa rendah diri *(inferiority complex)* yang tidak bebas-nilai, yang tidak terlepas dari batasan nilai-nilai moral-etikal Pancasila.

Oleh karena itulah maka “Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran” dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang.

Apa bentuk atau wujud karakter dan patriotisme yang harus kita bangun? Pembentukan watak atau *character building* yang bagaimana? Sebelum kita lanjutkan, perlu kita beri catatan di sini bahwa *character building* merupakan suatu tugas budaya. Oleh karena itu saatnya kita berpikir ulang bahwa perihal kebudayaan harus dikembalikan ke Kementerian Pen­didikan, *back-to-basics,* artinya kembali kita memiliki lagi "Ke­menterian PP dan K". Adalah kekeliruan yang sangat berbahaya bahwa kebudayaan direduksi ke dalam matra kepariwisataan sebagaimana saat ini kebudayaan berada dalam Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Orasi ini akan saya bagi menjadi 5 bagian, yang kelima­limanya akan saya ajukan sebagai butir-butir tuntutan implisit dan spesifik bagi pembentukan watak berdasar konsensus kita untuk melaksanakan cita-cita Kemerdekaan Nasional yang telah kita tetapkan dalam rambu nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut:

**I**

CITA-CITA NASIONAL SEBAGAI DASAR KARAKTER PATRIOTIK

Karakter bersumber pada "harga pribadi" atau "harga diri" baik sebagai manusia individu orang-seorang maupun transformasinya sebagai komunitas anak-bangsa. Hanya manusia atau bangsa yang mandiri 2) akan mampu mengemban harga diri. Ketiadaan harga-diri pada seseorang atau masyarakat adalah cacat dalam pendidikan. Cacat ini harus diminimalkan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah pernyataan kemandirian, suatu penegasan niat nyata untuk melepaskan diri dari ketergantungandan penegasan diri untuk bangkit tegak dengan keberdikarian yang utuh. Proklamasi Kemerdekaan dengan ruh kemandirian ini menjadi *"de hoogste beslissing"* (pesan tertinggi) bagi bangsa dan negara ini.

2) Saya kutibkan: "...Kemandirian adalah suatu sikap atau mindset, sikap berdikari menolak ketergantungan nasib-sendiri pada pihak lain, sikap menolak subordinasi, menolak pengemisan. Kemandirian adalah kepah­lawanan. Kemandirian adalah suatu percaya-diri dan kebanggaan-diri untuk mampu memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya, suatu prestasi-diri menolak ketertundukan atau ketertekuklututan. Mandiri adalah tuntutan kese­taraan. Mandiri adalah harga-diri, merubah sikap menghamba *(servile)* dan *minderwaardig* menjadi kedigdayaan. Ketika mandiri diangkat ke tingkat Bangsa dan Negara, maka kemandirian adalah doktrin nasional, doktrin untuk merdeka dan berdaulat, untuk mengutamakan kepentingan Nasional, yaitu kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara. Kemandirian nasional menolak supremasi dan dominasi mancanegara, tetapi bukan *xenophobic* atau anti­asing. Pada tingkat ini Negara menolak dependensi tetapi mengambil manfaat dari interdependensi global. Untuk itu kita proaktif ikut mendesain mekanisme dan wujud globalisasi. Kemandirian adalah sikap dan perilaku bebas-aktif..." (Dikutib dari Sri-Edi Swasono, *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945: Menolak Neoliberalisme,* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010, hlm. 126).

N

Hanya dengan kemandirian nasional sajalah 3), maka cita­cita kemerdekaan nasional dapat tercapai dan terselenggara. Cita-cita kemerdekaan nasional kita sangatlah mulia, yaitu:

*"...membentuk suatu pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umur, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ..."* (Pembukaan UUD 1945).

Barangkali kita semua dapat mengambil kesimpulan, bahwa pendidikan dan pengajaran yang telah kita selenggarakan belumlah berhasil dalam melahirkan pemimpin-pemimpin na­sional atau pun anak bangsa yang tangguh, untuk berkemampuan melaksanakan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan ini. Pada tataran kenegaraan, peran negara sebagai "Negara Peng­urus" yang harus melaksanakan *good governance,* masih sulit kiranya dikatakan telah berhasil.

*Mengenai melindungi segenap bangsa Indonesia:* Segenap bangsa Indonesia masih belum terlindungi oleh negara, kemiskinan dan pengangguran masif telah menyudutkan rakyat dalam keterancaman hidup yang berkepanjangan. Rakyat kita belum cukup terlindungi dari kemiskinan dan pengangguran yang penuh nestapa, meningkatnya tindak kriminal, meluasnya penggunaan narkotika, tidak terlindungi dari petaka *human trafficking* dan dari kekejaman eksploitatori dan diskriminatori serta tindak kepangrehan dan kecongkakan birokrasi yang korup.

3) Artinya secara bersama-sama menjalin dan memadukan secara sinergis kemampuan mandiri orang-seorang dari seluruh anak bangsa.

Rakyat tidak terlindungi dari kesengsaraan, kekecewaan dan kecemburuan sosial, dari ketidaktenteraman hidup karena tidak terjaminnya kerukunan nasional yang dapat memben­tukkan *peaceful co-existance.*

*Mengenai melindungi segenap tumpah darah Indone­sia:* Demikian pula, segenap tumpah darah Indonesia, Tanah Air kita, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote, tidaklah cukup terlindungi pula, baik keutuhan, kesuburan maupun kualitas keaneka-ragamannya (hayati, biota dan genetika) yang memukau. Sebagian pulau, seperti Sipadan dan Ligitan, telah hilang begitu saja tanpa disesali, tanpa ada pengibaran bendera setengah tiang oleh pemerintahan negara.

Timor-Timor juga hilang begitu saja karena kedangkalan simplisme, karena diabaikannya keampuhan diplomasi yang semula telah dipersiapkan dengan matang, dan juga karena kewalahan dalam penyelenggaraan perang melawan separatisme di Timor-Timor. Provinsi Aceh menjadi provinsi eksklusif yang bertentangan dengan Konstitusi dan doktrin NKRI, dengan segala resiko di masa depan, karena TNI "diperintahkan" berhenti berperang melawan separatis GAM. "Pulau-pulau terdepan" bahkan dengan seenaknya disebut sebagai "pulau­pulau luar", sebagai pantulan bawah-sadar tentang keberada­annya "di luar" keutuhan *mindset* integral. *Mindset* divergen imaginer ini harus segera diluruskan berdasar adagium

besi: *"sedumuk bathuk senyari bumi, pecahing dhadha wutahing ludiro sun labuhi taker pati"* (bila muka dicoreng, sejengkal tanah dirampas, pecahnya dada dan tumpahnya darah 'kan kubela, nyawa taruhannya).

Hutan kita pun terbabat sampai ke kondisi sangat kritis, sekaligus menggambarkan ketidakmampuan pemerintahan negara memberantas para pembalak hutan. Laut kita ramai­ramai dipakai *jag japan* orang luar, dijadikan ajang jarahan neoliberalisme mancanegara. Alat penjagaan untuk melindungi segenap tumpah darah ini tidak cukup memperoleh perhatian *urgen* seiring lemahnya kepemimpinan nasional dalam menggariskan prioritas dan strategi pembangunan. Gedung­gedung dan kompleks hunian mewah lebih memperoleh prioritas dan memperoleh posisi urgensi karena dangkalnya komitmen terhadap cita-cita mengemban tugas *good govern­ance* ini. Tidak kurang dari dua puluh undang-undang neoliberalistik telah diterbitkan yang nyata-nyata hegemonik terhadap kedaulatan ekonomi Tanah Air, yang terang-terangan merupakan penyelewengan nyata terhadap mandat konstitusi (hal ini telah menjadi topik disertasi S3 terpuji yang berhasil dipertahankan di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia baru-baru ini — *lihat hlm. 44).*

*Mengenai memajukan kesejahteraan* umum: Memang cita-cita dan upaya memajukan kesejahteraan umum mencapai kemajuan pada pemerintahan Orde Baru. Namun kesejahteraan umum saat ini cukup

memprihatinkan, tidak saja karena kemiskinan dan pengangguran makin intensif dan tetapmasif,tetapi juga makin terbentuk kesenjangan antara aspirasi baru dengan kenyataan yang ada.

Aspirasi rakyat meningkat karena terpacu oleh iklan-iklan mewah di media massa. Iklan-iklan konsumtif hanya bisa direspon secara positif oleh mereka yang kaya, lalu diterima sebagai eforia imajiner seolah-olah semua penduduk sudah mencapai tingkatan sebagai *an affluent society.* Sementara itu Pasal 34 UUD 1945, menegaskan bahwa "fakir miskin dan anak­anak yang terlantar dipelihara oleh negara" belum terlaksana. Namun berdasar pesan Konstitusi melalui Pasal 27 (ayat 2) UUD 1945 bahwa "tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", maka Doktrin Kesejahteraan Rakyat Indonesia lebih menekankan pada *workfare* (anti pengangguran) daripada pada *welfare* (santunan altruisme filantropis).

Memang ada kemajuan dalam upaya berupa UU, seperti UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial, namun pelaksanaannya masih tersendat-sendat, antara lain karena ada pertentangan kepentingan yang arahnya senantiasa kurang simpatik terhadap yang lemah.

Kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, termasuk listrik, gas, pendidikan dasar, kesehatan rakyat, tranportasi

rakyat, perumahan rakyat, makin tidak kunjung terjangkau oleh keterbatasan tenaga-beli rakyat.

Pendidikan adalah upaya untuk mencapai kehidupan yang cerdas dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah suatu konsepsi budaya, bukan sekedar konsepsi biologis-genetika. Pendidikan bukan semata-mata untuk menghasilkan otak yang cerdas melainkan juga untuk mencapai kemajuan adab, budaya dan persatuan. Nilai-nilai dan norma-norma inilah yang oleh para Bapak Bangsa disusun dengan tulus untuk mengisi kebu­dayaan nasional sebagai pedoman bagi rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi Negara merupakan suatu mindset kecerdasan kehidupan untuk mempersatukan bangsa Indonesia 4). Membudayakan Pancasila adalah proses *character building*.

Mengenai perihal ikut melaksanakan ketertiban Dunia: Barangkali cita-cita nasional yang utuh ikut melaksanakan ketertiban dunia, kita boleh mendapat acungan jempol. Peran Indonesia dalam menggalang suatu blok bebas-aktif (doktrin politik luar negeri Indonesia), yaitu dalam membentuk kerjasama dan solidaritas Asia-Afrika (1955) menuju terbentuknya Gerakan Non-Blok (1961), aktif dalam ikut membentuk Kelompok Selatan (menghadapi Kelompok Utara), sebagai pendiri dan aktivis ASEAN dan berada dalam *commanding* *position*, dan senantiasa aktif

sebagai aktor dalam berbagai misi-misi perdamaian, baik di dalam maupun di luar PBB, sangatlah terpuji. Namun mengapa kita sekarang tiba-tiba melempem menghadapi gertakan *"wani angas"-nya* Malaysia terhadap pulau terdepan kita.Banyak jawaban menarik dapat diberikan, tetapi tentu tidak kita bicarakan pada kesempatan ini.

**II**

KONSTITUSI INDONESIA MENOLAK INDIVIDUALISME, LIBERALISME DAN PASAR BEBAS

Marilah kita layangkan catatan sejarah tentang karakter patriotik Indonesia dalam memperjoangkan kemerdekaan bangsanya, sebagai berikut:

Bung Karno "menggugat" di Pengadilan Bandung (193), *pleidooi-nya* berjudul *"Indonesie Klaagt-Aan"* ("Indonesia Meng­gugat"), menegaskan: *"...imperialisme berbuahkan `negeri-negeri mandat, Vaerah pengaruh'... yang di dalam sifatnya `menaklukkan' negeri orang lain, membuahkan negeri jajahan... syarat yang amat penting untuk pembaikan kembali semua susunan pergaulan hidup Indonesia itu ialah Kemerdekaan Nasional...".*

4) Lihat Meutia Hatta Swasono, "Antropologi dan Integrasi Nasional", Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Indonesia, Jakarta 25 Maret 2006

Dua tahun sebelumnya Bung Hatta menuding Pengadilan Den Haag (1928), dalam pleidooi-nya berjudul *"Indonesia Vrij"* ("Indonesia Merdeka"), Bung Hatta menegaskan: "*...lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain...".*

Kemerdekaan Indonesia berdasar pada dua doktrin sejoli, yaitu Doktrin Kerakyatan (yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dengan demokrasinya yang berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan dengan mekanisme musyawarah-mufakat) dan Doktrin Kebangsaan (yang mene-gaskan nasionalisme dengan

pengutamaan kepentingan nasional bersama, yang bertumpu pada ruh dan kekayaan batin Bhinneka Tunggal Ika).

Saya telah diminta oleh Panitia Dies Natalis untuk mengkaitkan pengembangan (atau pembangunan) karakter dan patriotisme dengan pembangunan ekonomi Indonesia. Terus terang saya lebih tahu mengenai ekonomi daripada mengenai padagagie. Para penyelenggara Universitas Negeri Yogyakarta-lah para *padagoog*-nya yang bisa menjabarkan metode dan tehnik pendidikan dalam pembentukan karakter melalui kurikula dan silabi efektif, maka saya menghindarinya, saya akan mulai saja dengan keekonomian.

Meningkatkan ketangguhan ekonomi nasional baik dari segi sistem maupun dari segi kelembagaan tidak akan berhasil apabila pemerintahan negara tidak menolak neoliberalisme dan kembali ke

pesan Konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, sebagai rujukan imperatif utamanya.

Orasi ini terpaksa saya susun secara njelimet sedemikian rupa, sehingga dapat pula nanti menjadi acuan akademis di ruang-ruang kelas matakuliah sosial-ekonomi dan sekaligus untuk menggugah kesadaran kita sebagai insan akademis bahwa ilmu adalah suatu jabatan mengabdi, bahwa kita mengemban tugas untuk meniti dan mengembangkan "ilmu amaliah" dan selanjutnya mempersembahkan "amal ilmiah" kepada Tanah Air, Bangsa dan Negara. Saya tegaskan, sudah lewatlah zaman *Wertfreiheit der Wissenschaft — the neutrality of science.*

Patriotisme adalah suatu *commitment of nationalism-in action.* Untuk membangun ekonomi nasional haruslah mem­bangun berdasar ideologi Pancasila, khususnya berdasar Pasal 33 UUD 1945 dan pasal-pasal konstitusi pendukung lainnya. Pasal 33 UUD 1945 khususnya adalah garda nasionalisme ekonomi Indonesia, bahkan garda kemandirian nasional.

Marilah meneruskan orasi ini dengan mengedepankan suatu keprihatinan nasional terlebih dahulu, dengan perta­nyaan-pertanyaan: *Pertama,* mengapa pembangunan yang terjadi di Indonesia ini menggusur orang miskin dan bukan menggusur kemiskinan? Akibatnya pembangunan menjadi proses dehumanisasi. *Kedua,* mengapa yang terjadi sekedar pembangunan *di* Indonesia

dan bukan pembangunan Indo­nesia? Orang mancanegara yang membangun Indonesia dan menjadi pemegang konsesi bagi usaha-usaha ekonomi strategis, sedang orang Indonesia menjadi penonton atau menjadi jongos globalisasi. *Ketiga,* mengapa "daulat pasar" dibiarkan begitu berkuasa, sehingga menggusur "daulat rakyat". *Keempat,* bu­kankah seharusnya kita menjadi Tuan di Negeri Sendiri, suatu semangat patriotik untuk menjadi *"The Master in our own Homeland, not just to become the Host",* yang hanya melayani kebutuhan atau menjadi sekrup globalisasi dan kepentingan mancanegara? Jadi mengapa kita tetap menjadi *koelie* di Negeri Sendiri, sekedar menjadi *master of ceremony? Kelima,* telah gagalkah kita mencerdaskan kehidupan bangsa ini sehingga kita tidak mampu memahami kemuliaan makna mandiri?

Kita boleh merasa beruntung bahwa kita saat sedang menyaksikan peristiwa besar di dunia, suatu perubahan yang saya harap bukan sekedar *intermittent,* yang tidak terjadi dalam jangka panjang di masa lampau. Perubahan besar ini terjadi sebagai akibat harus mulai ditinggalkannya pola-pikir lama karena munculnya tuntutan-tuntutan baru, ibarat letupan dalam skala mondial.

Peristiwa besar ini terjadi karena tidak bisa lagi dipertahankannya pakem atau paradigma lama, dengan terjadi­nya krisis finansial 2008, bahkan yang meledaknya di Amerika Serikat 5), barangkali dari segi teori sosial semacam tahap baru,

5) Perubahan yang bukan sekedar *intermittent,* yang mungkin lebih langgeng, telah diharapkan Mohammad Hatta (1934) dan Radjiman Wediodiningrat (1943) ketika keduanya menentang pasar-bebasnya Adam Smith. Kemudian juga sudah diperkirakan dan bahkan diharapkan terjadinya oleh Polanyi sebagai *the end of market society* setelah terjadinya *the disintegration of a uniform market economy (but) without the absence of the market...ceasing altogether to be an organ of economic self-regulation.* Lihat Karl Polanyi, *The Great Transformation* (Boston: Beacon Press, 1944), hlm. 251. Kartohadiprodjo (1962) menegaskan pangkal tolak Barat berupa individualisme dan kebebasan akan membawakan krisis besar (krisis total) yang akan terus melanda Barat dan dunia yang telah terhegemoni, lihat Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa* (Jakarta: Gatra, 2010) hlm. 34o. Susan George pun telah membayangkan perubahan besar ini, saya yakin bukanlah sekedar *a wishful thinking* dan bukan pula *a self-fulfilling prophecy,* dikatakannya: *"the mood is changing, people no longer believe that the unjust world order is inevitable...",* lihat Susan George, *Republik Pasar Bebas,* terjemahan (Jakarta: INFID/Bina Rena Pariwara, 2002), hlm. xxiv. Lebih awal dari apa yang dikemukakan Susan George, Thurow telah mengemukakan perihal berikut ini: *"...the transition from one mode of thought to another is difficult, since it involves abandoning a beautiful sailing ship —the equilibrium price-auction model— that happens to be torn apart and sinking in a riptide. So a raft must be built to catch whatever winds may come by. That raft won't match the beauty or mathematical elegance of the sailing ship, although it has one undeniable virtue — it floats",* lihat Lester C. Thurow, *Dangerous Currents* (New York: Random House, 1983), hlm. 237. Demikian pula dikemukakan oleh Petras dan Veltmeyer: *"...it would be a failure of nerve of historic proposition to settle for anything less than a 'new' socialist society, the new nation as an integral whole, a new culture of participants and not spectators, a new internationalism of equals...",* lihat James Petras dan Henry Veltmeyer, *Globalization Unmasked* (London: Zed Books, 2001), hlm. 11-12. Pandangan­pandangan di atas sangat berbeda dengan ilusi (istilah Huntington) yang dikemukakan Francis Fukuyama tentang *the" end of history"* yang dinyatakannya sebagai *the end point of mankind's ideological evolusion and the universasialization of Western liberal democracy as the final form of human government,* lihat Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and The Remarking of World Order,* (New York: Simon & Schuster, 1996), hlm. 31. Bagi saya apa yang dikemukakan Fukuyama adalah suatu skenario dan jebakan pola-pikir. Apa yang ditulis oleh Josep Stiglitz dalam bukunya *Free Fall* ((New York: WW Norton, 2010) mempertegas perlunya INET *(Initiative for New Economic Theory)* untuk menegakkan "zaman baru" yang tidak terdikte oleh pasar-bebas.

post-modernitas dalam pemikiran 6).

Di Barat usia pasar telah mencapai lebih dari 250 tahun. Selama usia itu pasar memegang teguh asumsi-asumsi dasar yang ternyata saat ini tidak dapat lagi dikatakan valid atau realistik tatkala berhadapan dengan fakta-fakta empirik yang sangat kompleks dan beragam. Memang asumsi diperlukan untuk menyusun teori sebagai upaya penyederhanaan, sebagai *tools of analysis* atau alat analisa. Lalu asumsi-asumsi yang dikukuhkan secara imaginer dengan apa yang disebut sebagai kondisi *ceteris paribus,* tidak lagi masuk akal.

Di situlah masalahnya, betapapun suatu teori disusun dengan asumsi-asumsi yang valid dan solid namun kemudian bisa terbukti bahwa asumsi itu tidak realistik lagi. Apalagi apa­bila teori itu dikembangkan di dalam konteks suatu masyarakat tertentu, sesuai dengan tuntutan sosial-kultural tertentu, sistem nilai tertentu, ideologi tertentu, pada waktu dan tempat tertentu yang berbeda, yang secara keseluruhannya dapat saya katakan tidak lagi memenuhi tuntutan institusional-nya, maka teori yang valid berdasar asumsi pada masyarakat tertentu, menjadi tidak realistik dan sekaligus tidak relevan untuk masyarakat yang lain.

6) Lihat cara pandang post-modernitasnya Pip Jones, *Introducing Social Theory* (Cambridge: Polity Press/Blackwell), Chapter. 9.

Sebelum saya melanjutkan tentang makna dan dimensi teori yang terbentuk berdasar asumsi-asumsi dasar tertentu, saya ingin menyampaikan lebih dahulu makna daripada "pasar" yang telah berusia lebih dari 250 tahun itu.

Definisi elementer mengenai pasar, sebagaimana diajar­kan di ruang-ruang kias, adalah suatu tempat atau *locus* bertemunya penjual dan pembeli, bertemunya penawaran dan permintaaan atau *supply* dan *demand.* Harga akan terjadi pada tingkat keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Ini menjadikan pasar sebagai suatu mekanisme lelangan atau *auction mechanism,* yang berarti pula yang kuat akan menang dalam lelangan itu. Sebaliknya yang lemah, yang tidak memiliki cukup tenaga beli, akan terpaksa berada di luar pasaran, menjadi penonton, tidak ikut bertransaksi, yang bisa pula berarti tak mampu memenuhi tuntutan kebutuhan, kandas mencapai aspirasi, terpaksa harus sengsara atau menderita kelaparan. Inilah mekanisme pasar, yang bagi mereka yang tidak memiliki tenaga beli, pasar merupakan suatu mekanisme yang tidak ramah kepada yang miskin. "...Pasar adalah suatu instrument yang tidak cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan untuk masyarakat yang telah makmur... pasar merupakan pelayan yang rajin bagi yang kaya, tetapi tidak memihak kepada yang miskin.... Artinya harga yang dibentuk oleh pasar adalah merupakan sekedar "keseimbangan pasar", tetapi bukan "keseimbangan masyarakat"

untuk menjamin tercapainya "keadilan sosial bagi seluruh masyarakat". Itulah sebabnya Lester Thurow (1983), ekonom terkemuka dari MIT, mekanisme pasar semacam ini disebut sebagai *the dangerous current* atau arus berbahaya bagi keseimbangan masyarakat. Bahkan lebih lanjut is dan Heilbroner menyebut (1994) bahwa pasar mendorong perbuatan yang tidak bermoral, 7) hal mana tidak hanya merupakan suatu kegagalan ekonomi tetapi juga merupakan suatu kegagalan moral. Dosen-dosen kita percaya pada teori *supply* dan *demand* tanpa mengkritisi dan tanpa koreksi atau renovasinya secara kreatif sesuai dengan ideology dan realism Indonesia.

Para dosen ilmu ekonomi mestinya harus senantiasa ingat bahwa mereka telah mengajarkan ilmu ekonomi berdasar buku teks induk *Economics* yang ditulis oleh Prof. Paul A. Samuelson (yang pada tahun 1970 memperoleh hadiah nobel ekonomi). Tentulah buku ini berideologi fundamentalisme pasar. Edisi pertama buku ini ditulis pada tahun 1948 dan edisi kedelapanbelas (terakhir) pada tahun 2005. Dari edisi pertama sampai edisi kedelapanbelas yang terakhir itu, tidak ditemukan sekalipun perkataan *cooperation* (kerjasama/gotong-royong) apalagi perkataan *cooperatives* (badan usaha koperasi).

7) Robert Heilbroner dan Lester Thurow, *Economics Explained,* Edisi Baru (New York: Simon Schuster), hlm. 255-256.

Buku induk ini, yang kemudian diikuti dengan buku-buku teks lainnya (Dernburg & McDougall, Lipsey & Steiner, Stonier & Hague, Bilas dB) hanya memperkenalkan ilmu ekonomi di kampus­kampus kita dari segi *competition* (persaingan) saja. Ini berarti *mindset* kita "dicekok" dengan paham neoklasikal sehingga pola-pikir ekonom kita terkapsul dan dengan demikian mudah menerima dan membenarkan kapitalisme dan liberalisme (kemudian neoliberalisme).

Beberapa akademisi Indonesia juga menulis buku-buku pengantar ilmu ekonomi, seperti Sadono Sukirno, Herman Rusyidi, Prathama Rahardja & Mandala Manurung dll, pada hakikatnya masih bertitik-tolak dari paham neoklasikal yang mengajukan *competitive economics* dan fundamentalisme pasar (pasar-bebasnya *laissez-faire),* meskipun menyinggung sistem ekonomi Indonesia dan menyebut perkataan "koperasi". Apakah ini berarti bahwa buku-buku induk dan pengantar-pengantar ilmu ekonomi di atas harus ditolak? Sama sekali tidak, apalagi yang berupa hukum-hukum dasar ekonomi yang bersifat teknis dan *value-neutral.* Buku-buku tersebut harus tetap menjadi bahan ajaran di ruang-ruang kelas, namun harus secara kritis dikuliahkan dengan mengkoreksi dan memberikan inovasi, serta mengadaptasikan (bukan mengadopsikan) teori-teori neo­klasikal yang bertentangan dengan ideologi nasional kita. Harus diingat bahwa secara ideologis posisi rakyat adalah "sentral­substansial", jangan sampai tereduksi menjadi "marginal-residual". Kita menganut paham kebersamaan

*(mutualism,* ber­jemaah) dalam asas kekeluargaan *(brotherhood, ber-ukhuwah)* dan menentang paham liberalisme dan individualisme yang menampilkan *self-interest* yang menjadi dasar dari *competitive economics* ke arah pencapaian *maximum satisfaction principle* dan *maximum profit and gain principle* berdasar indivi­dualisme, yang tidak selalu bersambung dengan manfaat sosial dan kepentingan sosial seluruh masyarakat. Di samping itu proses pembangunan ekonomi adalah proses humanisasi, bukan proses dehumanisasi, sehingga "daulat pasar" tidak dibenarkan sama sekali menggusur "daulat rakyat". Buku-buku induk dan buku-buku pengajaran ilmu ekonomi yang berdasar neoklasikal, tentulah (ibaratnya) dapat dengan mudah mewajarkan neolibe­ralisme. Namun dari segi perkakas analisa *(tools of analysis)* berisi teori dan tekhnik ekonomi canggih, *substantially magnificent.* Kita harus pandai-pandai memanfaatkannya, dan mendidik para mahasiswa agar mampu mengemban *the culture of excellence.*

Neoliberalisme adalah wujud baru dari liberalisme seba­gaimana neokapitalisme adalah wujud baru dari kapitalisme. Lalu apa beda liberalism dengan neoliberalisme? Neoliberalisme adalah liberalisme baru yang hidup di era globalisasi, demikian pula neokapitalisme adalah kapitalisme baru yang hidup dalam era globalisasi. Istilah neoliberalisme tidak/belum dikenal dalam buku-buku teks di awal 1990-an, sebagaimana istilah globalisasi tidak dikenal dan belum tercantum dalam kamus-kamus dan ensildopedi-

ensiklopedi yang terbit pada awal 1990-an, dan sepanjang pengetahuan saya tidak ada pula di buku-buku teks yang terbit pada periode sebelum awal 1990-an. Namun demikian pemikiran bakal terjadinya globalisasi (belum menggunakan istilah globalisasi) sudah kelihatan nampak dalam bukunya kaum futuris (di luar ilmu ekonomi) seperti Alvin Toffler *(The Third Wave,* 198o). Sementara itu saya mencatat Jan Tinbergen pada tahun 1962 telah menerbitkan buku *Shaping the World Economy,* namun ia belum menggunakan istilah *globalization* kemudian Jan Tinbergen menerima Nobel Ekonomi pada tahun 1969. Tatkala saya menemui Jan Tinbergen pada tahun 1990 dan membicarakan bukunya ini, ia mengatakan buku tersebut sudah agak ketinggalan zaman, ia toh saat itu belum menggunakan istilah *globalization.*

Begitu pula dalam buku-buku induk mengenai *compa­rative economic systems* yang ditulis oleh dua tokoh besar mengenai bidang ini seperti Morris Bornstein (1994), Paul Gregory & Robert Stuart (1985) belum ada satu istilah pun *globalization* dan *neoliberalism* dicantumkan. (Dapat dime­ngerti bila beberapa akademisi senior yang juga *market fundamentalist* dengan sikap *coquettish* mengatakan "apa itu neoliberalisme, tidak ada dalam buku-buku teks"). Istilah neoliberalisme lebih predatorik sesuai brutalitas globalisasi ekonomi terhadap negara-negara lemah- ekonomi. Ada yang mencoba *(nastily)* membela neoliberalisme dari segi istilah, bahwa *neo* diartikannya sebagai *semi 8)* sehingga berarti

tidak benar-benar atau hanya agak liberal. Istilah *semi* dikacaukannya dengan istilah *quasi.* Neoliberalisme adalah penjajahan baru bagi perekonomian Indonesia. Menolak neoliberalisme merupakan panggilan patriotik. Taat pada prinsip, taat pada doktrin nasional, tegas dan teguh menjunjung paham nasio­nalisme akan tergantung pada keberhasilan pendidikan dan pengajaran nasional menyelenggarakan *character building.*

Namun kepada para mahasiswa, saya menjelaskan bah­wa pasar tidak hanya sekedar suatu *locus* atau tempat bertemu­nya permintaan dan penawaran, tetapi pasar adalah suatu kekuatan besar yang saya sebut sebagai *the global financial tycoons* (atau *taoke-taoke* financial global), yaitu raja-raja penguasa modal global dengan kekuasaan ekonomi luar biasa yang berbentuk *Trans National Corporation* termasuk yang melembaga sebagai Bank Dunia, IMF, ADB dll (Swasono, 2004). Mereka inilah, dengan kekuatan dan *global networks-nya* mencoba menguasai dunia, menyebarkan sistem ekonomi pasar­bebas memakai topeng globalisasi untuk menutupi karakter aslinya selaku kekuatan neoimperalisme dan neoliberalisme, membentuk suatu penjajahan baru terhadap negara-negara lemah-ekonomi dan lemah-politik.

8) Lihat, Martin Wolf, *Why Globalization Works* (New Haven: Yale University Press, 2004), him. 13 (mengutip Vargas Llosa).

Apa itu pasar-bebas? Pasar-bebas adalah pasarnya Adam Smith 9) dengan buku terkenalnya (1776) *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations —* disingkat *The Wealth of Nations.* Pasar-bebasnya Adam Smith bertitik-tolak dari paham liberalisme dan individualisme *(perfect individual liberty* dengan *self-interest-nya* yang tidak menghendaki intervensi dari negara). Pasar-bebasnya Adam Smith mem­bentukkan sistem ekonomi liberalisme dan neoliberalisme, yang melahirkan pengajaran ilmu ekonomi neoklasikal berdasarfundamentalisme pasar yang parsial

9) Kedudukan ilmu ekonomi sebagai suatu ilmu moral sesungguhnya justru diawali oleh Adam Smith, yang telah beramai-ramai kita nobatkan sebagai Bapak Ilmu Ekonomi, sebagai "nabi" atau *patron saint-nya homo economicus.* Pada usia menjelang lima belas tahun Smith masuk University of Glasgow dan mendapat pengaruh filsafat moral dari Francis Hutcheson. Di situ ia berkenalan dengan berbagai *issues* kontemporer mengenai altruisme dan kebijakan dalam hubungan kemanusiaan sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes dan Bernard Mandeville, bahwa *self-interest* dan egoisme merupakan daya dorong kemajuan di dalam masyarakat. Selanjutnya *self-love,* moralitas, psikologi moral dan perdagangan telah menjadi tema-tema utama pula dalam alam pikiran Smith.

Karir akademis Adam Smith adalah dosen Rhetoric, guru besar Logic dan Moral Philosophy, seorang ilmuwan *moral science,* yang secara formal tidak pernah menjadi *student of economics,* namun dialah yang mencanangkan teori dan hukum dasar ekonomi yang kita kenal sebagai *the division-of-labour,* sebagai titik awal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ia pula yang menegaskan peranan manusia sebagai pelaku ekonomi dengan *self-interested behaviour-nya* di dalam pasar yang ia gambarkan sebagai *self-regulating* (juga *self-correcting)* karena adanya *an invisible hand.* Ia mengutamakan *natural liberty* dan menentang *interventionism* meskipun (kemudian) ia menyatakan pentingnya *"the Sovereign"* (Negara) bertang­gungjawab terhadap anggaran untuk *defence, justice, publick works & publick institutions* (ejaan asli).

Sebagai mahasiswa di Glasgow, Smith gemilang dalam pengetahuan Yunani dan Latin. Sebelum ia menerbitkan bukunya *Wealth of Nations* (lengkapnya *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)* pada tahun 1776, 17 tahun sebelumnya ia menerbitkan *The Theory of Moral Sentiments* (1759), yang antara lain menggambarkan tentang empati atau kecenderungan cinta kasih manusia kepada masyarakatnya, yaitu tentang *propensities such as fellow feeling and the desire to attain the approval of his brethren ...* adanya suatu *man's disposition to, and fitness for, society.\** Bahkan mengawali bukunya yang lebih

(tidak utuh) dan yang mengemban asumsi-asumsi dasar atau mitos-mitos kapitalisme Smithian, yaitu bahwa: (1) Kebutuhan manusia diasumsikan tidak terbatas; (2) sumber-sumber ekonomi diasumsikan relatif terbatas; dan (3) diasumsikan pula bahwa manusia mengejar pemenuhan maksimal kebutuhan individualnya *(utility maxi­mization of self-interest)* yang relatif tak terbatas. Konsekuensi dari ketiga asumsi dasar itu berkelanjutan dengan anggapan bahwa akhlak dasar manusia adalah bertarung untuk saling berebut yang disebut dengan istilah ekonomi sebagai *free-competition* dalam kehidupan berekonomi. Berarti manusia yang rasional berebut mengejar utilitas ekonomi optimal, mencari keuntungan maksimal atau *maximum gain,* dan mencari *minimum sacrifice* atau pengorbanan minimal.Dengan demikian itu manusia menjadi aktor bebas di pasar-bebas dan berpedoman pada *laissez-faire laissez-passer,* yang meneguh­kan doktrin *non-interference* berdasar *individual freedom of action.*

awal ini, Adam Smith mengemukakan:"...How *selfish soever man may be supposed, there are evidently some prin­ciples in his nature, which interest him in the fortune of others, and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it, except the pleasure of seeing it...".* Memang ada perubahan pada jalan pikiran Adam Smith, posisi yang diambilnya dalam *Moral Sentiments* tidak mudah dirukunkan dengan posisi yang diambilnya dalam *Wealth of Nations* dan ini telah menimbulkan perbedaan-perbedaan penafsiran (inkonsistensi) yang dikenal sebagai *das Smith Problem —* artinya *the problem of Smith* (Amitai Etzioni 1988). Kebanyakan kaum neoklasikal mengabaikan Adam Smith yang awal demi yang belakangan. Kaum neoklasikal cenderung mengabaikan implikasi asumtif mono-utilitas (paradigma neoldasik) dengan demikian mengabaikan kenyataan bi-utilitas yang terkandung dalam *The Theory of Moral Sentiments.* Dengan istilah Sen, ada suatu *essential and irreducible "duality"* pada konsepsi individual di dalam kalkulasi etikal. Kiranya istilah *invisible hand* telah dieksploitasi kelewat berlebihan. Lihat Sri-Edi Swasono *Ekspose Ekonomika* (Yogyakarta: Pustep UGM, 2008), hlm. 6-10.

Manusia rasional semacam ini disebut *homo economicus* atau "manusia ekonomi" yang berpedoman pada kejalangan *"homo homini lupus. Homo economicus* adalah lawan dari *homo ethicus 10).*

Pasar bukan lagi sekedar "apa", tetapi "siapa", pasar adalah *the global financial tycoons.*

Paham ekonomi Adam Smith berdasar falsafah dan titik tolak liberalism dan individualism *(self-interest).* Mekanisme pasar-bebas atau laissez-faire dikatakan oleh Adam Smith dioperasikan oleh *an invisible hand* atau suatu tangan tak nampak alias

*10) " 'Homo economicus'* atau `manusia ekonomi' adalah agen individual yang berada di pusat teori ekonomi neoldasik (teori utilitarian, hedonis dan menitikpusatkan pada diri-sendiri, yang rasionalis dan beretika individualis). Ia egois, rasional, berupaya untuk mencapai utilitas secara maksimum. Ia bertindak secara independen dan nonkooperatif, sebagai atom sosial yang terisolasi tanpa mempunyai naluri akan masyarakat sekitarnya, dan perilakunya dimotivasi semata-mata oleh kepentingan-diri pribadi secara sempit. *Economic man* atau "manusia ekonomi" bersifat materialistik tanpa emosi samasekali dan merupakan manusia yang membuat perhitungan dengan kepala dingin: ia seorang `egois yang rasional'.... *'Homo economicus'* modern secara bengis bersikap rasional, ia tamak dan oportunistik; ia tak dapat dipercaya dan ia tidak mempercayai orang lain, ia tidak mampu memberi komitmen dan akan selalu berupaya untuk mendapat manfaat secara gratis; ia menganggap keegoisannya serta segala sifat dan perilakunya sebagai wajar..."

Sebaliknya: "... *'Homo ethicus'* samasekali berbeda dan bahkan merupakan kebalikan dari *homo economicus.* Ia seorang altruistik dan individu yang kooperatif, jujur dan cenderung berbicara tentang kebenaran, ia dapat dipercaya dan mempercayai orang lain. Ia memperoleh kepuasan moral dan emosional dari menghormati kewajibannya kepada orang lain, ia mempunyai kesadaran yang tinggi akan kewajiban dan mempunyai komitmen yang kuat atas tercapainya tujuan-tujuan sosial. Ia merupakan seorang *'team-player'* alamiah, ia dapat secara efektif mengkoordinasi tindakannya dengan tindakan orang lain dan bekerja demi manfaat bersama dengan orang lain. Ia me­nganggap resiprositas merupakan sesuatu yang wajar, meskipun bukan sebagai alasan penting agar ia bisa mendapat manfaat secara gratis atau berperilaku dalam suatu kepentingan kolektif ...". (M.Teresa Lunati, 1997) lihat Sri-Edi Swasono, *Ibid.,* hlm. 4.

“tangan ajaib” yang bisa mengatur sendiri (*self*-*regulating*) dan mengkoreksi segala kesalahan mekanisme ekonomi *(self-correcting)* yang serba tahu *(omniscient)* dan ser­ba perkasa *(omnipotent).* Perkataan *"invisible-hand"* hanya di­sebut satu kali (pada halaman 527) dalam bukunya setebal 1200 halaman. Kiranya para ekonom Smithian yang berideologi liberalisme dan individualisme sengaja memanfaatkan perkataan *"invisible-hand"* secara berlebihan untuk kepentingan ideologi.

Ternyata selama lebih dari 250 tahun itu the *invisible hand* atau "tangan gaib"-nya Adam Smith tidak pernah muncul dan yang muncul adalah kegagalan-kegagalan pasar atau *mar­ket-failures.* Semula diharapkan yang muncul adalah Ratu Adil, ternyata Durga. Dikira tangan ajaib membawakan keadilan sosial, ternyata menggusur yang lemah dan miskin. Sehingga pada akhirnya muncul tuntutan-tuntutan agar paham pasar­bebasnya Adam Smith dikoreksi secara mendasar dengan seruan *the end of laissez-faire* atau perlu diakhirinya pasar-bebas. Pasar-bebas melalui *perfectly free-competition* atau persaingan­bebas hanya akan menguntungkan yang kuat dan menggusur atau mematikan yang lemah. Apa yang berlebihan atau keter­laluan dari paham ini adalah bahwa persaingan-bebas semacam itu justru dianggap akan melahirkan *efficiency* ekonomi yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Mereka yang percaya akan hal ini disebut sebagai kaum fundamentalis pasar. Sangat boleh diperkirakan pandangan kaum fundamentalis pasar ini berdasar pada peradaban kuno yang jahiliah, sangat tidak

manusiawi, yang kita kenal dengan *survival of the fittest,* hanya yang kuat yang bisa bertahan hidup, yang tersisih dan tidak selamat tidak perlu disesali.

Di ruang kelas, para dosen kita yang itu-itu juga dan yang begitu-begitu melulu, dengan kecongkakan dan kelengahan intelektualnya mengajarkan kriteria pasar persaingan sempurna *(perfectly free-competition),* antara lain berlakunya asumsi *free-entry* dan *free-exit* dengan segala ignoransinya. Tanpa mau tahu bahwa *free-entry* adalah memangsa dan mencaplok *(predatoric* dan *aquisitory),* sedangkan *free-exit* adalah tersisih dan mati gulung tikar.

Lalu apa itu neoliberalisme? Tidak mudah bagi sekelom­pok ekonom fundamentalis pasar melepaskan diri dari mitos tangan ajaib *(the invisible-hand)* dan pasar-bebas *(free-market)* senyawanya ini. Setiap kali dituntut berakhirnya pasar-bebas *(the end of laissez-faire),* setiap kali pula doktrin fundamen­talisme pasar, sebagai cerminan paham individualisme *(self-interest)* dan liberalisme, muncul kembali.

Menurut catatan saya sudah lima kali ditegaskan perlunya mengakui *the end of laissez-faire,* berakhirnya fundamentalisme pasar. *Petama* kali oleh tokoh besar John Maynard Keynes (1926); *kedua* oleh Moh. Hatta, Karl Polanyi (1934 dan 1944); *ketiga* oleh Gunnar Myrdal, John Kenneth Galbraith, Francis Bator, Paul Baran dll (1957-1960); dan *keempat* oleh Robert Kuttner, Lester Thurow, George Soros, Joseph Stiglitz, Susan George, dll (1990-2002).

Intinya adalah bahwa pasar tidaklah *self-regulating,* tidak *self-correcting,* penuh *market failures,* terutama dalam mengatasi ketim­pangan-ketimpangan struktural. Para Nobel laureates 2007 (Eric Maskin, Leonid Hurwicz, Roger Myerson); 2008 (Paul Krugman); 2009 (Elinor Ostrom dan George Akerlof) barangkali sebagai penegas *kelima* yang mendukung *the end of laissez-faire.* Sebelum Keynes (1926) tentulah *laissez-faire* telah ditolak oleh Robert Owen, seorang reformis sosial, pendekar sosialisme, tokoh gerakan koperasi Inggris dan oleh Karl Marx dengan *the Communist Manifesto* (1848) dan dengan *Das Kapital-nya* (1867).

Peran pasar memang penting, tetapi harus dikontrol Negara. Stiglitz dan Akerlof (2009) menegaskan bahwa sistem pasar-bebas perlu diwaspadai, kegagalan pasar yang terlalu sering terjadi, telah menuntut ide-ide INET *(Initiative for New Economic Thinking)* seperti yang diajukan George Soros, Stiglitz dan Akerlof. Bagi Pasal 33 UUD 1945, sebagai INET saya, maka pasar haruslah ramah kepada rakyat dan kepentingan nasional, bukan sebaliknya negara yang harus ramah dan tunduk kepada pasar atau pun posisi rakyat direduksi dan disubordinasi oleh kepentingan pasar.

Pasal 33 UUD 1945 adalah konsepsi Hatta, bukan kiri dan bukan kanan, tetapi jalan lurus sesuai Pancasila. Hal ini konsisten benar dengan konsepsi politik luar negerinya Hatta "bebas-aktif', yang bebas diartikan sebagai tidak meng­ekor AS ataupun US, dan yang aktif diartikan sebagai secara mandiri menggariskan

kebijaksanaan nasionalnya secara lurus sesuai kepentingan nasional.

Globalisasi adalah tempat bersembunyinya fundamental­isme pasar sebagai penjajahan baru, hegemoni dan perampokan oleh kaum pemodal global *(the global financial tycoons)* yang melembaga di sekitar Washington terhadap Negara-negara berkembang. Kita perlu tekun membaca Meier & Stiglitz, *The Frontiers of Development Economics (2001).*

Mengapa tiap kali *the end of laissez-faire* ditegaskan, se­tiapkali is muncul kembali? Jawabnya: kapitalisme tidak bisa hidup tanpa *laissez-faire,* kapitalisme tidak bisa hidup tanpa pasar-bebas, ibarat ikan tidak bisa hidup tanpa air. Globalisasi dan pasar-bebas neoliberalistik bawaannya, adalah topeng neokapitalisme dan neoimperialisme, yang sesuai sifat dasar bawaannya, akan tetap eksploitatori, predatori, akuisitori dan rakus.

Kebangkitan neoliberalisme merupakan suatu perang ide. Perang ide ini barangkali telah mereka "menangkan" untuk sementara, yang membentukkan hegemoni akademis 11) di kampus-kampus kita melalui pengajaran ilmu ekonomi neo­ldasikal *(mainstream neoclassical economics)* dan didukung oleh sumbangan kepustakaan dari lembaga-lembaga neoliberal. Berulangkali hal ini telah saya kemukakan 12).

11) Lihat Sri-Edi Swasono, "Kesadaran Geografi Kita", KOMPAS, 17 April 2006.

1. Lihat Sri-Edi Swasono, "Menolak Liberalisme", Lokakarya Kurikulum Berbasis Kompetensi, FEUI, i8 Februari, 2010.

Susan George 13) menggambarkan pula betapa sengitnya perang ide itu berjuang keras menyebarkan neoliberalisme dan mempertahankan kapitalisme global, yang dibiayai oleh kor­porasi-korporasi dan yayasan-yayasannya secara besar-besaran, memasuki dunia kampus dan lembaga-lembaga penelitian ter­hormat, "membeli" para intelektual dan editor-editor majalah terkemuka, mengadakan perdebatan-perdebatan artifisial yang direkayasa dan dimuat di *New York Times, Washington Post dan Time Megazine, The World Bank, WTO* ikut dalam perang ide ini, sebagai bagian dari pabrik ideology neoliberalisme.

Susan George menggambarkan pula bengisnya neo­liberalisme di Amerika Serikat, apalagi terhadap negara-negara berkembang14), melalui korporasi-korporasi dan lembaga-­lembaga internasional pendukungnya.

Catatan buku ekonomi saya yang saya kutipkan dari The Economist, posisi Indonesia di dunia adalah sebagai oenghasil biji-bijian terbesar nomor 6; beras terbesar nomor 1; terbesar nomor 6; kopi terbesar nomor 4; coklat nomor 3; minyak sawit nomor 2;

13 Susan George, *op.cit*. hlm. 75-101.

14) Selama dasawarsa 1980-an keluarga Amerika yang berada 10% di puncak pendapatannya meningkat rata-rata 16%, yang 5% di puncak mening­kat rata-rata 23%, yang 1% di puncak meningkat 50% (mereka patut ber­terimakasih kepada Presiden Reagan), yang 8o% di bawah tentu kehilangan sesuatu yang tidak sedikit. Pada tahun 1977 keluarga Amerika lapisan puncak 1% memiliki pendapatan rata-rata 65 kali lebih besar dari mereka yang berada di lapisan bawah 10%. Sepuluh tahun kemudian angka ini menjadi 115 kali lebih besar, */oc. cit.* (Catatan saya: di Indonesia angka rata-rata itu diper­kirakan 350-400 kali lebih besar).

lada putih nomor 1; lada hitam terbesar nomor 2; fuli dan pala terbesar nomor 1; karet terbesar nomor 2; karet sintesis terbesar nomor 4; kayu lapis terbesar nomor 1; ikan terbesar nomor 6 *(The Economist).* Indonesia dengan kesuburan tanah dan kekayaan alamnya yang luar biasa itulah yang menghasilkan komoditi-komoditi strategis bagi dunia.

Di sektor minyak dan gas bumi Indonesia termasuk dalam jajaran 20 negara terbesar penghasil minyak; 10 negara terbesar penghasil gas, dan *7* negara terbesar pengekspor gas; pengekspor batubara terbesar di dunia; produsen emas terbesar nomor 6; produksi nickel terbesar nomor 3; produksi perak terbesar nomor 11; penghasil timah terbesar nomor 2 setelah Cina. Indonesia merupakan kekuatan utama dalam penyediaan energi lainnya di dunia *(ibid.).*

Tentu memalukan bagi kebanyakan ekonom kita yang menerima neoliberalisme sebagai *"given"* karena terjebak oleh teori berdasar *market-fundamentalism* di ruang klas dan kurang peka akan paham strukturalisme yang berjiwa kebang­saan dan kerakyatan. Akan saya kutipkan pendapat berikut yang justru dikemukakan oleh seorang insinyur, Siswono Yudhohusodo, mantan Ketua HKTI, semata-mata karena is mampu berfikir strukturalistik *(mimeo,* 2010). "...Kita telah merdeka sejak tahun 1945, namun pada waktu ini terasakan bahwa dalam banyak

aspek, kita kurang berdaulat; dalam banyak hal kita terlalu mematuhi keinginan negara lain. Karena itu politik ekonomi kita terasa kurang berwawasan kebangsaan. Kita telah menjadi bangsa yang kurang percaya diri dengan tingkat ketergantungan yang semakin tinggi, menjauh dari cita­cita membangun bangsa yang mandiri. Manifestasinya tampak, antara lain, sebagai negara yang telah berpengalaman lebih dari 100 tahun di bidang eksploitasi migas, dari 120 KPS (Kontraktor Profit Sharing), 90 persennya milik asing. Dari total produksi nasional sekitar 1.000.000 barrel/hari, yang dihasilkan oleh Pertamina hanya berkisar 90.000 barrel/hari, dan Medco, swasta nasional 6o.000 barrel/hari. Mayoritasnya diproduksi oleh asing, dan yang terbesar adalah Chevron, 450.000 barrel/hari.

Walaupun telah ditemukan cadangan minyak yang sangat besar antara lain di Cepu, produksi minyak kita terus menurun, Jika pada tahun 1977 produksi setiap hari 1,7 juta barrel dengan konsumsi di dalam negeri sekitar 1 juta barrel, maka kita bisa mengekspor sekitar 700.000 barrel/hari, yang menjadikan Indonesia sebagai anggota OPEC terpandang; pada waktu ini tinggal sekitar 850.000 barrel/hari dengan *cost recovery* (biaya yang ditanggung pemerintah) meningkat tinggi. Mayoritas kegiatan pertambangan, emas, perak, nikel, batubara dan lain-lain dikelola asing. Pertambangan tembaga dan emas, 100 persen dikuasai asing, diserahkan kepada Freeport dan Newmont. Selain itu, 30 persen

perkebunan kelapa sawit juga telah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing, padahal sebenarnya kebun-kebun sawit ini merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ketergantungan pada impor pangan juga semakin besar. Pasar pangan amat besar yang kita miliki telah dimanfaatkan dengan sangat baik oleh produser-produser pangan di luar negara kita. Kita mengimpor sapi 650.000 ekor/tahun yang artinya merupakan 25 persen konsumsi nasional, mengimpor susu 90 persen konsumsi nasional, garam 50 persen konsumsi nasional, kedele 7o persen konsumsi nasional, bawang putih 90 persen konsumsi nasional dan gula tebu 40 persen konsumsi nasional. Padahal semua itu, kita bisa memenuhinya sendiri dengan meningkatkan produksi yang sekaligus menyediakan lapangan kerja yang amat luas, menghemat devisa dan lebih membanggakan. Untuk mencapainya, kita memang perlu lebih percaya diri, dan memiliki semangat kemandirian yang besar. Pembangunan jembatan Surabaya-Madura yang tidak ada kendala apa pun bila dikerjakan oleh kontraktor nasional, justru dikerjakan kontraktor China.

Beberapa pemerintahan terdahulu melakukan kesalahan dengan memenuhi tekanan IMF untuk menjual BUMN dan aset swasta yang disita BPPN, kepada pihak asing. Akibatnya, banyak aset BUMN yang amat prospektif kini dikuasai asing. Indosat, VLCC, Pertamina, BCA, BII, Bank Danamon telah kita jual murah ke pihak asing. Sektor perbankan dan telekomunikasi yang sangat

menguntungkan dan strategis, sudah jatuh ke tangan asing, menyusul sektor Migas yang sudah sejak dulu dikuasai asing. Tragisnya, ketika kita ingin memilikinya kembali, pihak asing menawarkan dengan harga yang berlipat….". Tentang definisi neoliberalisme, saya ingin kemukakan secara singkat untuk menjawab tuntutan politis yang marak saat ini. Neoliberalisme adalah mekanisme penjajahan ekonomi baru. Neoliberalisme mendorong mekanisme pasar-bebas, menekan campur-tangan negara seminimal mungkin. Di sinilah neoliberalisme mengakibatkan digugurkannya "daulat rakyat" dan diunggulkannya "daulat pasar".

**III**

AMBIVALENSI KAUM INTELEKTUAL DAN AKADEMISI EKONOMI

Ambivalen bukanlah karakter terpuji, sikap ambivalen adalah cacat dalam pendidikan. Cacat ini harus direduksi se­maksimal mungkin.

Kongres XVII Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) diadakan tanggal 3o Juli — 2 Agustus 2009. Saya secara tegas menyatakan bahaya neoliberalisme. Isu anti neoliberalisme memang sempat menjadi objek kampanye para Capres dan Cawapres. Ketiga pasangan Capres dan Cawapres kesemuanya hebat karena ketiganya mengangkat isu neoliberalisme yang sedang marak dan melanggar pesan konstitusi, sekaligus ketiganya berjanji memajukan ekonomi rakyat. Apakah mereka menyebutnya "sistem ekonomi ter­pimpin", "sosialisme-Indonesia", "sistem ekonomi Pancasila", "sistem ekonomi konstitusi", "sistem ekonomi jalan-lurus", "sosialisme

religius", ataupun mekanisme pasar terkendali, atau "sistem trilogi pembangunan dengan delapan lajur pemerataan", yang penting kita perhatikan adalah telah tibanya tuntutan riil untuk kembali ke sistem ekonomi Indonesia yang benar, dan itu hanyalah sistem ekonomi berdasar Pasal 33 UUD 1945 dalam payung Pancasila berikut "Kaidah-Kaidah Penuntun"-nya (GBHN 1993). Orientasi utama sistem ekonomi konstitusi ini adalah pada pengutamaan kepentingan ekonomi rakyat. Perlu dicatat pula, demi sinergisme kekuatan berbangkit, wadah ekonomi rakyat 15) adalah koperasi.

15)Keberadaan ekonomi rakyat justru tidak boleh dilihat dari segi pemihakan semata-mata, apalagi dari segi caritas-filantropis. Ekonomi rakyat justru mempunyai peran strategis di dalam sistem dan struktur ekonomi. Dengan peran strategisnya ekonomi rakyat memberikan kontribusi sangat besar terhadap kehidupan ekonomi nasional. Makna ekonomi rakyat sebagai strategi pembangunan itu, antara lain: (1) Dengan rakyat yang secara partisipatori-emansipatori berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi akan lebih menjamin nilai-tambah ekonomi optimal yang mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Pemerataan akan terjadi seiring dengan pertumbuhan. (2) Memberdayakan rakyat merupa­kan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga rakyat lebih secara konkret menjadi aset aktif pembangunan. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun diri dan kehidupan ekonominya merupakan investasi ekonomi nasional dalam bentuk *human investment* (bukan pem­borosan atau *inefficiency)* serta mendorong tumbuhnya kelas menengah yang berbasis *grass-roots.*(3) Pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya­beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya sendiri *(self-empowering),* sehingga rakyat mampu me­raih "nilai-tambah ekonomi" dan sekaligus "nilai-tambah sosial" (nilai-tambah kemartabatan). (4) Pembangunan ekonomi rakyat sebagai pemberdayaan rak­yat akan merupakan peningkatan *collective bargaining position* untuk lebih mampu mencegah eksploitasi dan subordinasi ekonomi terhadap rakyat. (5) Dengan rakyat yang lebih aktif dan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi maka nilai-tambah ekonomi akan sebanyak mungkin terjadi di dalam-negeri dan untuk kepentingan ekonomi dalam-negeri. (6) Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan sumber­sumber alam dalam-negeri yang tersedia *(endowment factor* Indonesia) ber­dasar strategi *resources-based* dan *people-centered. (7)* Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyerap tenaga kerja. (8) Pembangunan ekonomi rakyat akan bersifat lebih "cepat menghasilkan" *(quick-yielding)* dalam suasana eko­nomi yang sesak napas dan langka modal. (9) Pembangunan perekonomian rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional akan meningkatkan keman­dirian ekonomi dalam-

Bahwa ada beberapa ekonom senior meremehkan penyimpangan konstitusional ini dan bilang "...apa itu ekonomi rakyat, apa itu neoliberalisme, tidak ada di buku teks...", itu adalah suatu kegenitan

negeri, akan menekan sebanyak mungkin ketergan­tungan akan *import-components* dan meningkatkan *domestic-contents* pro­duk-produk industri dalam-negeri, yang selanjutnya akan lebih mampu mengembangkan pasaran dalam-negeri. (10) Pemberdayaan perekonomian rakyat yang akan lebih mampu memperkukuh pasaran dalam-negeri yang akan menjadi dasar bagi pengembangan pasaran luar-negeri. (ii) Dalam globalisasi ini kita harus tetap waspada terhadap paham globalisme yang cenderung menyingkirkan paham nasionalisme. Kepentingan nasional Indonesia harus tetap kita utamakan sebagaimana negara-negara adidaya selalu mempertahan­kannya pula dengan berbagai dalih ekonomi ataupun politik. Pembangunan perekonomian rakyat akan menjadi akar bagi penguatan fundamental ekonomi nasional dan menjadi dasar utama bagi realisasi nasionalisme ekonomi. (12) Pembangunan perekonomian rakyat dapat dilaksanakan tanpa mempergun­jingkan ekstremitas positif-negatifnya peran dan mekanisme pasar. (13) Pem­bangunan perekonomian rakyat merupakan misi politik dalam melaksanakan demokratisasi ekonomi sebagai sumber rasionalitas bagi pemihakan kepada rakyat kecil. (14) Satu dekade yang lalu ada ajakan untuk meninjau ulang strategi-strategi pembangunan *(Development Strategies Reconsidered, Over­seas Development Council,* 1987) dan ajakan yang mutakhir *(The Frontiers of Development Economics,* Meier & Striglitz, 2001) menegaskan betapa perlu ada pergeseran paradigma-paradigma dalam pemikiran ekonomi. Perekono­mian rakyat memperoleh tempat dalam rekonsiderasi di situ. Lebih dari itu, bagi mereka yang masih mau melepaskan ortodoksi perlu membaca ide-ide lama dan baru mengenai *social market economy.* (15) Secara keseluruhannya, butir-butir tersebut di atas akan lebih menjamin terjadinya pembangunan Indonesia, bukan sekadar pembangunan *di* Indonesia. (16) Pembangunan eko­nomi kerakyatan bertumpu pada *platform* bahwa yang kita bangun adalah rakyat, bangsa dan negara. Pembangunan pertumbuhan ekonomi (GNP) ada­lah derivat dari *platform* ini, sebagai pendukung dan fasilitator bagi pemba­ngunan rakyat, bangsa dan negara. (17) Dalam kenyataan, ekonomi rakyat mampu menghidupi sebagian terbesar dari rakyat Indonesia, di tengah-tengah pasang-surutnya sektor perekonomian formal-modern, sejak awal kemerde­kaan hingga saat ini. (18) Selama ini, khususnya dalam masa-masa sulit, ekonomi rakyat memberikan lapangan kerja dan jugs memberi kehidupan murah *(low cost economy* dan *low cost of living)* kepada rakyat, khususnya kepada buruh-buruh korporasi-korporasi besar berupah rendah. Dengan kata lain ekonomi rakyat memberi *trickle-up effect* atau mensubsidi perekonomian besar. (Proses *trickle-down effect* neoliberalistik menjadi ilusif dan delusif). (19) Dan seterusnya. Kesemuanya mendukung percepatan upaya melaksana­kan transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Tentu kita tidak harus berhenti pada butir 19 saja.

elitis belaka, suatu *academic coquett,* sarat kemalasan dan mungkin sekadar ketertinggalan dalam membaca literatur, yang sekaligus merupakan absurditas aka­demis. Barangkali pula mereka itu tidak memiliki kepekaan ideologis yang tidak bisa membedakan antara "pembangunan Indonesia" dengan sekedar "pembangunan di Indonesia".

Neoliberalisme di Indonesia adalah kelanjutan dari libe­ralisme jaman penjajahan yang ditentang oleh Soekarno-Hatta. Liberalisme adalah sukma kapitalisme, selanjutnya neoli­beralisme adalah sukma neokapitalisme-imperialistik.

Indonesia Merdeka berdasar pada doktrin Kebangsaan (nasionalisme) dan doktrin Kerakyatan (rakyat berdaulat). Dari sini lahirlah konsepsi politik ekonomi berdasar Demokrasi Ekonomi yang dipangku oleh dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia maka "kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang" (walaupun kepentingan warganegara orang-seorang tidak boleh diabaikan semena-mena). Demokrasi Ekonomi Indonesia menegaskan bahwa "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" agar keselamatan dan keamanan negara serta kebutuhan dasar *(basic needs)* masyarakat terjamin. *Subject matter-nya* adalah "dikuasai oleh Negara". Apabila tidak bisa "dikuasai" tanpa "dimiliki" (karena berlakunya *the global rule of the*

*game* dengan ketentuan imperatifnya tentang *one share one vote* yang sangat *rigid),* maka cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu haruslah "dimiliki" oleh Negara. Demokrasi Ekonomi Indonesia meng­hendaki pula bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang ter­kandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kehidupan dan kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara" agar terjamin dapat digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian sistem ekonomi Indonesia tegas-tegas bermatra nasionalisme. Kita tidak anti asing, investasi asing kita terima, tetapi tidak untuk mendominasi *(overheersen)* ekonomi nasional dan menggusur ekonomi rakyat (lihat catatan kaki halaman 28-29).

Tak perlu kita repot-repot tentang definisi neoliberal­isme. *Neoliberalisme adalah mekanisme penjajahan ekonomi baru.* Neoliberalisme mendorong mekanisme pasar-bebas *(laissez-faire),* menekan campur-tangan negara seminimal mungkin. Pasar-bebas adalah topeng globalisasi ekonomi preda­torik. Di sinilah neoliberalisme mengakibatkan digugurkannya "daulat rakyat" dan diunggulkannya "daulat pasar".

Pandangan bahwa neoliberalisme percaya pada "tangan ajaib"-nya pasar yang tak nampak, yang bisa mengatur ekonomi sendiri merupakan paham kuno dan empirik keliru. Ketim­pangan struktural, terutama kemiskinan dan pengangguran, tidak akan bisa

diatasi oleh "tangan ajaib". Nasib rakyat bukan barang titipan yang bisa begitu saja diserahkan ke pasar. Kaum strukturalis sangat *concerned* dengan masalah kesejahteraan sosial atas pahamnya yang menolak ketimpangan­ketimpangan struktural serta proses dehumanisasi yang inheren di dalam sistem ekonomi pasar-bebas.

Paham strukturalisme, baik strukturalisme awal maupun neostrukturalisme, adalah paham yang menolak ketimpangan­ketimpangan struktural sebagai sumber ketidakadilan sosial­ekonomi. Kaum strukturalis mengungkapkan dan mengusut ketimpangan-ketimpangan struktural yang berkaitan dengan pemusatan penguasaan dan pemilikan aset ekonomi, ketim­pangan distribusi pendapatan, produktivitas dan kesempatan ekonomi. Kepedulian akademik-ilmiah pemikir strukturalis meliputi pula masalah ketimpangan dalam kelembagaan, par­tisipasi dan emansipasi sosial-ekonomi, pengangguran, kemis­kinan struktural dan masalah ketergantungan serta subordinasi *(dependency and subordination)* sosial-ekonomi.

Kaum strukturalis menempatkan ilmu ekonomi pada peran normatifnya, menjelajahi komposisi dan interrelasi antara para aktor, sektor-sektor dan variabel-variabel ekonomi dalam rangka perwujudan keadilan dan kesetaraan sosial-ekonomi. Apabila strukturalisme menolak mekanisme pasar-bebas adalah karena pasar-bebas secara inheren menumbuhkan ketidakadilan sosial-ekonomi. Demikian itulah maka strukturalisme banyak menggelar

tuntutan transformasi ekonomi dan transformasi sosial yang harus dianggap inheren dalam proses pembangunan nasional. Dalam kaitannya dengan ancaman dominasi dan hegemoni kekuatan ekonomi global, dapat dipahami bahwa strukturalisme berkaitan erat dengan nasionalisme ekonomi.

Pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan bahwa *"Perekono­mian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas keke­luargaan',* jelas sangat strukturalistik. Artinya perekonomian secara imperatif *harus disusun,* tidak dibiarkan tersusun sendiri sesuai kehendak dan perilaku para penguasa pasar. Ketimpa­ngan-ketimpangan antara kaya dan miskin, antara kota dan desa, antara Jawa dan luar Jawa, antara pengusaha asing dan pengusaha nasional, harus direstruktur dengan campur tangan pemerintah, agar daulat-pasar tidak menggusur daulat-rakyat.

Pasar neoliberal itu kejam, tanpa emosi dan tanpa moralitas-etikal, yang ada hanyalah moralitas *the winner-take­all,* yang kuat mengambil semuanya. Negara harus aktif mengatur dan merombak ketimpangan-ketimpangan struktural, kalau tidak yang kuat menggusur yang lemah. Sementara itu telah terjadi pula penjajahan kurikulum *(academic hegemony)* terhadap fakultas-fakultas ekonomi kita. Pengajaran Ilmu Ekonomi sebatas neoklasikal yang mengemban sepenuhnya paham liberalisme/neoliberalisme dengan pasar­bebas yang menyertainya. Neoliberalisme tidak *pro-job,* tidak *pro-poor,* tidak pula *pro-economic nationalism.* Pasar-pasar rakyat dan pasar-pasar tradisional digusur oleh *supermarkets, malls* dan *hypermarkets,*

sehingga terjadi eksklusivisme bagi yang kuat dan marjinalisasi terhadap yang lemah. Rakyat miskin tergusur, pembangunan rakyat akibatnya tidak *inherent* dengan pembangunan ekonomi. Bahkan pengajaran Ilmu Ekonomi di ruang-ruang kelas bisa mengalahkan pesan konstitusi, Pasal 27 ayat 2 16), Pasal 33 17) dan seterusnya diabaikan. Ini adalah hege­moni akademik, yang membelit dosen-dosen kita menjadi *academic followers,* yang mudah kagum pada *mainstream neo­classical* Barat, yang barangkali mengingkari ideologi nasional dan buta perjuangan bangsanya, lalu mewajarkan bahwa ke­dudukan modal lebih utama dari nasib manusia.

Posisi rakyat adalah "sentral-substansial" (bukan "marginal-residual"). Posisi rakyat ini harus dapat melahirkan prinsip "keterbawasertaan". Dalam setiap kemajuan pem­bangunan rakyat harus secara otomatis terbawaserta ikut maju, atau bahkan harus didorong maju, rakyat harus kita *em­powered,* agar tidak menjadi beban pembangunan, yang harus kita transformasi menjadi aset pembangunan. Itulah mengapa dapat dibenarkan bahwa Amartya Sen melihat pembangunan dari segi *human empowerment* dan mendefinisikan bahwa pembangunan sebagai *expansion of people's capabilities.*

16) Pasal 27 ayat 2: "Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

17) Pasal 33: "(1) Perekonomian disususun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperghunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Pem­bangunan ternyata telah menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan. Ingat, bahwa demokrasi Indonesia berdasar pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan *(mutualism* dan *brotherhood* alias ber-jemaah dan ber­*ukhuwah),* bukan berdasar asas perorangan (liberalisme/indi­vidualisme) sebagaimana demokrasi Barat.

Moga-moga para ekonom kita tidak termasuk yang kaget-kaget akan bahaya neoliberalisme dengan kerakusan pasar-bebas bawaannya yang dapat melumpuhkan ekonomi nasional dan memiskinkan rakyat, artinya terkaget-kaget tiba­tiba kita "menjadi *koelie* di Negeri Sendiri", tahu-tahu kita men­jadi jongos globalisasi. Globalisasi memang membuka *opportu­nities* tetapi juga menghadirkan *brutal impedances* bagi pemba­ngunan kita. Jangan seperti di Amerika Serikat, yang dijaga oleh empatpuluh pemenang Nobel Ekonomi, toh mereka terkaget­kaget, tidak menyangka bakal terjadi krisis besar finansial yang kemudian mengglobal ini. Mereka mewajarkan kerakusan neoliberalisme berikut adagium *greed-is-good* yang dianutnya dengan segala asumsi *ceteris paribus-nya* yang telah lama usang atau obsolit, sehingga mereka mengabaikan bisa munculnya *"the Black Swan",* yaitu *the impact of the highly improbable cumu­lative process* sebagaimana *fascinatingly* dikemukakan oleh Nassim Nicholas Taleb (2007). Masyarakat Amerika sekarang dengan benar mulai meragukan dan sebagian mulai menolak ideologi pasar yang mereka anut dua setengah abad.

Setelah mendengarkan dan ikut bicara di Sesi Pertama Kongres ISEI 2009 itu, saya ingatkan: Jangan sampai ISEI menjadi organisasi pembangkang yang menolak pesan-pesan konstitusi kita.

IV

KETERDIKTEAN:

PENYELEWENGAN AMANAT KONSTITUSI

Keterdiktean menjadi "Pak-Turut" atau *"yes* man" adalah cacat karakter, cacat dalam pendidikan. Berikut ini barangkali adalah contohnya:

Marilah ldta belajar berani, gagah perkasa teguh melak­sanakan semboyan patriotik *"niat ingsan"* untuk merdeka dan mandiri. Menolak keterdiktean. Saya kutibkan sebagai berikut.

*"In war there is no substitute for victory",* itulah sema­ngat joang sapujagad Jenderal MacArthur.

Pada Perang Kemerdekaan Indonesia 1945 semangat kita pun ampuh dengan adagium MacArthur. Kita meneriakkan tekad tanpa kompromi *"Merdeka atau Mati".*

Selama hampir 20 tahun terakhir saya banyak menulis di berbagai harian *(Kompas, Sinar Harapan, Suara Pembaruan, Media Indonesia, Pelita, Jawa Pos* dll) tentang perlunya kewas­padaan terhadap ideologi pasar-bebas. Terharulah merenungi mengapa kita harus terus "menari atas kendang orang lain", berikut ini contohnya:

Tahun 1812 bukan saja peristiwa besar di Eropa sebagai awal jatuhnya Napoleon Bonaparte atas kekalahan perangnya di Rusia.

Komponis Rusia Tchaikovsky memperingati peristiwa patriotik ini dengan mencipta komposisi orkestral *Overture 1812.*

Namun sebenarnya 1812 juga merupakan tahun ber­sejarah di Asia Selatan, yaitu matinya jutaan orang miskin di Gujarat. Gubernur Bombay melarang bantuan pangan sebagai solidaritas sesama rakyat dikirim ke lokasi kelaparan. Sang Gubernur menuding betapa bodohnya para setiakawan itu yang tidak membaca buku Adam Smith *The Wealth of Nations* yang menjelaskan bahwa *the invisible hand* (tangan ajaib)-nya pasar pasti akan mengatasi sendiri kelaparan rakyat itu. Betullah, tangan ajaib menyelesaikannya, orang miskin berkurang, karena mati secara massal.

Inilah lelucon intelektual yang tidak lucu mengenai pasar-bebas Adam Smith sebagaimana dikemukakan seorang pemenang Nobel, Dr. Amartya Sen.

Demikian pula seperti saya katakan di berbagai kesempatan memang tidak mudah bagi sekelompok ekonom pasar-bebas melepaskan diri dari mitos tangan ajaib-nya Adam Smith berikut kapitalisme berdasar pasar-bebas senyawanya, suatu keterdiktean intelektual, secara paradigmatik terbenam ke dalam *follower syndrome.*

Kesepakatan *Free Trade Agreement* (FTA) sebagai kelanjutan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) adalah derivat dari ideologi pasar-bebas. WTO memiliki 152 negara anggota. WTO mengambil prinsip dan persetujuan GATT, kemudian meng­gantikan GATT sejak Januari 1995.

Sebelumnya WTO menetapkan kesepakatan perda­gangan yang sebenarnya dipaksakan terhadap anggota-ang­gotanya. Orientasi WTO adalah liberalisme ekonomi, karenanya "privatisasi" merupakan agenda "paksaan" WTO yang disertai "sanksi". WTO didominisasi oleh AS, Jepang, Kanada dan Uni Eropa. Negara-negara lain yang tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru dapat diperkirakan akan bergabung sebagai dominator baru akan siap mengeksploitasi kelemahan negara­negara berkembang.

Itulah sebabnya sejak awal Sritua Arief mengecam ketika Menteri Perdagangan RI dengan mudahnya menandatangani kesepakatan Uruguay Round *(multilateral trade agreement)* dalam rangka pasar-bebas-nya GATT, yang menomorduakan kepentingan negara-negara berkembang. GATT diberi julukan *the rich men's club.* Desakan yang dikemukakan dalam *The Haberler Report* yang diperkuat ekonom-ekonom terkemuka yaitu Gottfried Haberler, James Meade, Jan Tinbergen dan Roberto Campos untuk menjaga kepentingan ekspor negara­negara berkembang, tidak digubris negara-negara maju (Arief 1998) dan keangkuhan GATT ini diwarisi WTO.

Keangkuhan lebih lanjut nampak dalam sidang-sidang APEC, bahwa *Asia Pacific Economic Cooperation* telah berubah dalam praktek menjadi *Asia Pacific Economic Competition.*

\*\*\*

Dari GATT dan WTO inilah berkecamuk liberalism (dan neoliberalisme) di Indonesia. Ini yang menyeramkan dan mengagetkan. Pada 29 November 2004 di Laos ASEAN-China *Free Trade Agreement* (AC-FTA) ditandatangani, pihak Cina oleh Menteri Bo Xi-lai dan Indonesia oleh Menteri Mari Elka Pangestu. "Terperangkaplah" Indonesia oleh kekuatan ekonomi global, khususnya oleh China.

Barang-barang dari luar-negeri, terutama dari China secara luar biasa telah membanjiri Indonesia. Saat ini 17 persen impor nonmigas Indonesia datang dari China, sedang hanya 8,5 persen ekspor nonmigas Indonesia masuk ke China. Defisit neraca perdagangan Indonesia dengan China ini bukanlah sekadar ketimpangan hubungan dagang, tetapi proses tergusur­nya industri Indonesia oleh industri China. Deindustrialisasi Indonesia mulai meluas. Sektor-sektor industri permesinan, perkebunan/pertanian, makanan dan minuman, plastik, tekstil dan produk tekstil, elektronik, besi baja, restoran, perdagangan retail mulai tergoyahkan dan kita boleh mencemasinya. Diperkirakan untuk masa mendatang arus predatorik ini akan makin besar dan membahayakan. Kasus ini hanya salah satu dari banyak hal di mana pemerintah terdikte oleh ide pasar­bebas dan persaingan-bebas.

Persaingan tidaklah identik dengan gemblengan tukang pande untuk meningkatkan kedigdayaan nasional. Persaingan, kata

*textbooks,* menumbuhkan efisiensi dan dapat terjadinya *free entry* dan *free exit* seperti saya katakan di atas, kenyataannya *free-entry* menjadi akuisisi ganas, dan *free-exit* menjadi keterpaksaan mati gulung tikar dan PHK besar­besaran. Sudah saatnya kita dengan tegas menyusun strategi nasional menuju kemandirian 18) dan ketahanan nasional yang tangguh. Kita pasti kalah bersaing dan jatuh tersungkur apabila tidak segera dibentuk strategi nasional secara sistematik dan jelas untuk meningkatkan daya saing, mengatasi berkecamuknya ekonomi biaya tinggi *(high cost economies)* dalam macam-macam bentuk destruktifnya. Telah lama industri kita dibiarkan jalan di tempat, bahkan makin keropos menjadi rongsokan. Betapa absurdnya pemerintah mudah mengge­lontorkan dana ke bank bobrok, tetapi sulit menolong usaha industri yang sakratul maut.

Khususnya untuk bidang manufaktur dan agro-industri kita harus segera menyusun strategi secara eksplisit berikut tuntutan-tuntutan logistik yang menyertainya. Kita harus mendesain *"industrial and business map"* sebagai *list of industrial opportunities* beserta *input-output matrix-nya,* memperkukuh pasaran dalam-negeri dengan mengolah sendiri produk-produk mentah menjadi barang jadi sebelum diekspor. Kita boleh berhutang atau mengundang investasi asing dengan tujuan tunggal: mempercepat tercapainya kemandirian dan kedigdayaan nasional.

18 Lihat catatan kaki 2 hlm. 3

Demi apapun, entah demi pasar-bebas, WTO, FTA, AC­-FTA atau demi apa saja, tidak seharusnya kita lalu membiarkan industri dalam negeri hancur dan menganggurkan tenaga rakyat oleh persaingan tak seimbang. Kita harus senantiasa meng­utamakan kepentingan nasional walaupun tetap perlu memper­hatikan tanggungjawab global. Adalah infantail dan sikap "sok global" meleceh doktrin ini dengan menudingnya sebagai nasionalisme sempit.

Marilah kita belajar menjadi komandan, tidak menari atas kendang orang lain, *let us learn to fight, not to surrender.* Ada empat hal yang harus kita lakukan secara simultan: sebagai renungan akhir tahun. 19) *Pertama,* meningkatkan kemampuan diplomasi, meraih *optimal bargaining position* kita, berani menolak mengorbankan kepentingan nasional, termasuk kalau perlu menunda secara parsial pelaksanaan berlakunya FTA. Kehancuran ekonomi Indonesia toh akan tidak menguntungkan para mitra dagang luar negeri.

19) Menarik sekali untuk kita perhatikan dialog antara Hendri Saparini dengan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu (pada pertemuan di PBNU tanggal 16 Februari 2010). Menurut Hendri Saparini dalam rangka meng­hadapi AC-FTA perlu didesain suatu *national industrial policy and strategy.* Respon Menteri Perdagangan bisa diduga, katanya: "...memang ada yang berpandangan bahwa itu perlu, tetapi yang berkembang di dunia sekarang, tidak diperlukan... saya berpandangan bahwa para pengusaha jauh lebih tahu...".

Betapa ketinggalannya Menteri Perdagangan kita dalam *development economics* dan munculnya *INET (Initiative for New Economic Theory).* Ia mengira yang berkembang di dunia sekarang adalah ekonomi yang masih berdasar *free-market,* artinya neoliberalisme dan neokapitalisme yang mulai ditentang seluruh dunia terutama negara-negara berkembang, yang sejak krisis 2008 di AS, ideologi ekonomi yang telah 25o tahun dianut oleh masyarakat AS ini sekarang mulai diragukan oleh para pemikir ekonomi di AS sendiri, bahkan menggusarkan Presiden AS. Jelas Menteri Perdagangan telah secara ortodoks menyerahkan nasib industri kita kepada pasar, kepada selera pengusaha, ia belum bisa percaya akan perlunya perencanaan dan regulasi, tidak percaya bahwa kegagalan-kegagalan pasar atau *market-failures* lebih

*Kedua,* FTA tidak boleh mengor­bankan kehidupan rakyat kita. Pelaksanaan FTA yang dipaksa­kan akan berubah menjadi proses pemiskinan rakyat, hal ini bertentangan dengan butir-butir MDGs, antara lain *eradication of extreme poverty. Ketiga,* menggugah kesadaran nasional secara luas untuk bersama-sama tidak membiarkan Indonesia terjajah secara ekonomi dan tertelan oleh monster perdagangan bebas.

Khususnya kita gugah kesadaran para importir Indonesia agar tidak sekadar mengimpor demi mencari untung dengan akibat hancurnya industri dalam-negeri, agar para importir mengemban nasionalisme, tidak semata-mata menjadi kom­prador dan kepanjangan tangan eksportir luar-negeri sahabat­sahabat mereka. Menteri Perdagangan harus bisa mengen­dalikan dan menegur para importir yang tidak nasionalistik.

sering terjadi dalam upaya membangun industri nasional yang tangguh, ia masih saja lebih percaya pada liberalisasi dan privatisasi, jadi apakah Menteri Perdagangan kita adalah seorang penganut Washington Consensus (deregulasi, liberalisasi dan privatisasi) belaka? Bagi Menteri Perdagangan nasib Negara dan nasib Rakyat cukup diserahkan kepada mekanisme pasar dan inklinasi para pemodal. Jelas ini bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Menteri Perdagangan pun kalah dalam diplomasi dengan Menteri Perdagangan China, tidak sungguh-sungguh berjoang memenangkan diplo­masi, *she learned to surrender* untuk mengecualikan serentetan 218 items untuk dikecualikan (ditangguhkan) dalam pelaksanaan *free-trade* tahun 2010 ini. Sampai Rizal Ramli mengatakan (pada acara Peluncuran buku Sri-Edi Swasono, 26 Maret 2010 yang baru lalu di BAPPENAS). kegelisahannya: "...apakah Menteri Perdagangan Marie Pangestu itu Menteri Perdagangan Republik Indonesia atau Menteri Perdagangan Republik China...".

Sementara itu Hendri Saparini menegaskan kepada Menteri Perdagangan: "...inilah beda saya dengan Menteri Perdagangan, saya dan kawan­kawan justru memandang mendesain suatu *industrial policy and strategy* hukumnya wajib sebagai referensi bagi pengembangan industri nasional...".

Tentu Hendri Saparini benar sekali.

*Keempat,* meningkatkan penggunaan *domestic resources* dan sekaligus meningkatkan penggunaan produk-produk dalam­negeri, baik dalam artian konsumsi, maupun produksi. Mengkonsumsi makanan (kuliner) dalam-negeri adalah tindak ideologis yang patriotic. *Kelima,* Rupiah kita yang terlalu mahal *(over valued)* harus didevaluasi untuk mendorong ekspor dan mengurangi impor. Untuk impor barang baku bagi industri nasional harus ada perlakuan sendiri, a.l. keringanan kredit impor. Memang akibatnya hutang luar-negeri akan menjadi beban ekstra bagi perekonomian nasional dan perlu penanganan sendiri, seperti moratorium, diplomasi dll.

\*\*\*

Itulah sebabnya setelah AC-FTA awal tahun ini mulai dan efektif menyerang industri nasional, produk-produk asing khususnya dari Tiongkok membanjiri dan menyingkirkan produk-produk nasional. Deindustrialisasi menjadi-jadi dan mencemaskan. Namun, toh tidak melihat, misalnya, Menteri Perdagangan demi penyelamatan perekonomian jangka pendek mengadakan rapat-rapat darurat ataupun rapat-rapat koor­dinasi dengan para pengusaha secara nasional (KADIN, DEKO-PIN, HIPMI, HIPPI, Asosiasi-asosiasi dll) sebagi usaha-usaha kontinjensi penyelamatan taktis-strategis. Bank-bank tidak pula nampak dimobilisasi oleh Menteri Perdagangan agar berperan sebagai *agent of development in contingency* bagi sektor Indus­tri yang terancam *free-trade,* tidak pula merasa perlu meme­rintahkan pemberian fasilitas kepada

importir-importir yang mengimpor barang-barang yang mematikan produk-produk dalam-negeri dihentikan dst dst. Tidak kedengaran pula bahwa Menteri Perdagangan melakukan himbauan kepada para impor­tir agar tidak asal mengimpor dan asal untung, tetapi juga me­nampilkan etika nasionalisme ekonominya. Lebih celaka lagi, ketika baru seminggu menjadi Menteri, pada 29 November 2004 di Laos ia menandatangani kesepakatan AC-FTA dengan Men­teri Bo Xi-Lai, tetapi selama 5 tahun menjadi Menteri ia tidak secara fundamental mempersiapkan industri nasional Indonesia menghadapi malapetaka AC-FTA. Jelas ini sikap pro-pasar, bukan pro-rakyat dan mengabaikan nasionalisme ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

Apa yang dikemukakan oleh Hendri Saparini sebenarnya selaras dengan apa yang saya usulkan sejak lama agar Pemerintah, dunia bisnis dan perbankan secepatnya mendesain *"industrial and business map"* berupa *list of industrial and business opportunities* beserta *input-output* matrix-nya, sehing­ga kita tahu memilih apa yang harus kita bangun, mana yang hanya memerlukan modal kecil, mana yang padat-karya, mana yang *resources-based* untuk mengurangi *idleness* SDA ataupun SDM. Keunggulan komparatif pun bisa kita rencanakan. Arahnya untuk memperkokoh pasaran dalam-negeri, meman­faatkan *local-specifics* dengan mengolah sendiri produk-produk mentah unggulan menjadi barang jadi sebelum diekspor. Ibarat kita memegang peta, maka kita tahu ke mana kita harus pergi dan memilih jalan dan kendaraannya. Dari sinilah *policy*

*and strategy of industrial development* kita susun dan kita laksanakan tanpa pemborosan dan meningkatkan daya-saing.

Tidak ada ruginya dituduh siapapun kita berwawasan nasionalisme sempit dan tidak ada hebatnya disanjung berwa­wasan nasionalisme modern.

Secara khusus pimppinan UBK meminta saya agar orasi ini bertema "bangkit lebih kokoh lagi dalam membangun sema­ngat kepeloporan untuk mewujudkan bangsa yang cerdas kehidupannya, sejahtera, adil dan beradab".

Nah, apa artinya adalah bangkit membangun semangat kepeloporan? Artinya bangkit menjaga *sovereignty* dan *terri­torial integrity,* menjaga NKRI, Pancasila dan UUD 1945 serta meneguhkan Bhinneka Tunggal Ika secara nyata, tidak hanya retorika. Cintailah Tanah Air kalian dan cintailah produk­produk dalam-negeri buah-tangan anak bangsa sendiri, karena hanya dengan demikian maka ekonomi dan pasaran dalam­negeri bisa berkembang. Bangunlah ekonomi rakyat agar berakar dan berkembang dengan kukuh, sehingga menjamin ke­sejahteraan rakyat, menjauhkan *impoverishment* dan *disem­powerment* terhadap rakyat. Susunlah kurikulum nasional kita dengan muatan-muatan nilai-nilai Pancasila, jangan biarkan terjadi hegemoni akademis yang hanya menelan teori dan pola­pikir yang tidak sesuai dengan kedudukan rakyat, yang saya katakan sebagai sentral-substansial dan jangan sekali-kali me­nempatkan posisi

rakyat sebagai marginal-residual. Bagi saya mengabaikan kemuliaan rakyat adalah mengabaikan kebera­daban.

Di depan sudah saya kutipkan semangat joang Jenderal MacArthur: *"In war there is no substitute for victory".* Ini patut menjadi semangat joang kita pula. Soekarno-Hatta selalu mendidik kita agar menjadi bangsa mandiri, keduanya senan­tiasa meneriakkan *onalhankelijkheid* (kemandirian), menolak *afhankelijkheid* (ketergantungan). Keduanya tidak anti investasi asing, namun keduanya menolak bila investasi asing *beheersen* (mempredominasi) apalagi *overheersen* (mendominasi) eko­nomi nasional. Soekarno-Hatta menolak kita sekedar menjadi kuli di negeri sendiri, dan saya menggaris bawahi, jangan sampai bangsa ini menjadi jongos globalisasi.

Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa membiarkan dan mewajarkan negara ini termakan neoliberalisme predatorik dan menjadi derivat serta obyek pasaran luar-negeri, ini ibarat anak tanggung yang "jaim" bersemboyan "biar bodo asal sombong".

Sebagai penutup, dapat saya sampaikan munculnya ge­taran batin baru untuk mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan bahwa MPR nanti harus menyusun Garis­Garis Besar Haluan Negara. Tahun yang lalu ada Kongres Pancasila pertama di UGM, tahun ini ada Kongres Pancasila kedua di Udayana Bali. Kemaren tanggal 30 Juni saya menjadi Ko-Promotor disertasi S3 Fakultas Hukum UI yang judulnya adalah *"Pasal 33 UUD 1945 sebagai Dasar Perekonomian Indonesia: Telah Terjadi*

*Penyimpangan Mandat Konstitusi"* para Guru Besar Penguji meluluskan Promovenda. Inikah pertanda hidup kembalinya perjanjian suci antara *Kawula Ian Gusti?* Sebenarnya inilah aksioma Hatta tentang Kerakyatan dan Kedaulatan Rakyat, istilah yang diciptakannya sendiri dan paham yang menjadi doktrin advokasinya sehingga Hatta digelari sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat pada acara Satu Abad Bung Hatta, 2002. Peristiwa yang menarik adalah ketika ditanyakan kepada Nitisoemantri, Penyelenggara dan Ketua Panitia Kongres Koperasi Pertama (1947) oleh Wangsawidjaja, mengapa' Hatta diberi gelar Bapak Koperasi? Dijawab oleh Nitisoemantri "karena Hatta adalah Bapak Kedaulatan Rakyat". Inilah yang ditegaskan dan ditulis oleh Hatta:

*"...Bagi kita, raYat itoe jang oetama, rajat oemoem jang mempoenjai kedaoelatan, kekoeasaan (souvereiniteit). Karena ra'jat itoe jantoeng-hati Bangsa. Dan raYat itoelah jang mendjadi oekoeran tinggi rendah deradjat kita. Dengan raYat itoe kita akan naik dan dengan raja kita akan toeroen. Hidoep ataoe matinja Indonesia Merdeka, semoeanja itoe bergantoeng kepada semangat ra'jat. Pe­ngandjoer-pengandjoer dan golongan kaoem terpeladjar baroe ada berarti, kalaoe dibelakangnja ada ra'jat jang sadar dan insjaf akan kedaoelatan dirinja..."* (Mohammad Hatta, Daulat Ra'jat, 20 September 1931).

Sesuai apa yang dikatakan Mohammad Hatta di atas, jelaslah bahwa "Tahta adalah milik Rakyat". Dengan demikian jelaslah posisi rakyat adalah "sentral-substansial" dalam alam­pikir Indonesia Merdeka, yang tidak boleh direduksi menjadi "marginal-residual".

Posisi rakyat yang "sentral-substansial" terakomodasi oleh apa yang dengan tepat dikemukakan oleh Rajni Kotari empatpuluh lima tahun kemudian, sebagai berikut ini:

*Dalam pembangunan nasional kita harus dapat men­desain strategi nasional "...which not only produces for the mass of the people, but in which the mass of the people are also producers" — tidak hanya memproduksi buat massa rakyat, tetapi massa rakyat itu adalah juga yang mem­produksinya sendiri...(Kotari, 1976).*

**V**

PENUTUP

Perlu kita catat bahwa setelah UUD 1945 diamandemen empat kali, dari segi interpretasi historis dan otentik, *Penjelasan* untuk Pasal 33 UUD 1945, tetap berlaku. Prof. Maria Farida Indrati Soeprapto (sekarang Hakim Mahkamah Konstitusi) juga telah menegaskan: *"...khusus untuk Penjelasan Pasal demi Pasal, memang dengan perubahan pasal-pasal dalam Undang­Undang Dasar 1945 maka Penjelasan Pasal-pasal tersebut dapat tidak sesuai lagi dengan makna dan rumusan pasal­-pasal yang baru, namun bagi pasal-pasal yang belum diubah tentunya penjelasan pasal-pasal tersebut masih berlaku dan sesuai dengan makna dan rumusan dalam pasal-pasalnya, misalnya Penjelasan Pasal 4, Pasal 22, dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3)...".20).*

20) Mimbar Hukum, Jurnal Berkala FH-UGM, No. 49/II/2005.

Dengan tetap berlakunya *Penjelasan* Pasal 33 UUD 1945 itu, maka tetap berlaku pula ketentuan bahwa: "...Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-orang". Privatisasi Indosat, PLN, Garuda, Pertamina, Angkasa Pura, Pelindo dll adalah pengkhianatan konstitusional oleh negara. Omongan ringan seperti: "Cina dan India pun sekarang giat melakukan privatisasi" adalah suatu celoteh penjerumusan, sebab apa yang semula merupakan perusahaan negara di Cina dan India, di Indonesia sejak awal (sudah) merupakan bidang kegiatan swasta. Cina dan India meskipun melakukan privatisasi masif, tetapi tetap menguasai dan memiliki penuh cabang-cabang produksi strategisnya, tidak akan diswastanisasi.

Sebagai penutup perlu saya sampaikan, bahwa adalah suatu kebetulan, bahwa penulisan Orasi ini masih terkesan oleh satu Ujian Terbuka mahasiswi Pascasarjana Elli Ruslina guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 14 Juli 2010 yang lalu. Judul disertasi Promovenda adalah *"Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Dasar Perekonomian Indonesia: Telah Terjadi Penyimpangan Terhadap Mandat Konstitusi".* Enam Guru Besar ahli hukum dari Fakultas Hukum UI dan satu Doktor ahli hukum dari Fakultas Hukum UI, dan satu Guru Besar ahli hukum dari Unpad dan satu Guru Besar ahli ekonomi dari Fakultas Ekonomi UI (Prof. Safri Nugraha, SH, LLM, PhD/Dekan FHUI/Ketua Sidang/Penguji; Prof. Dr. Agus

Sardjono, SH, MH/Promotor/Penguji; Prof. Sri-Edi Swasono, SE, MPIA, PhD/Ko-Promotor/Penguji; Dr. Jufrina Rizal, SH, MA/Ko-Promotor/Penguji; Prof. Erman Rajagukguk, SH, LLM, PhD/Penguji; Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, PhD/Penguji; Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU/Penguji; Prof. Dr. Anna Erliyana, SH, MH/Penguji; Prof. Dr. Rosa Agustina, SH, MH/Penguji), telah meluluskan Pro­movenda ini dan memutuskan ia berhak menyandang gelar Doktor dalam Ilmu Hukum. Penyimpangan terhadap mandat konstitusi memang benar-benar terjadi dan memperoleh pembenaran dart para penguji dengan segala integritas yang mereka sandang sebagai ilmuwan dan akademisi.

Demikianlah, tuntutan budaya kita untuk membangun karakter dan patriotisme sangatlah kompleks, meliputi tuntutan untuk memahami pesan konstitusi dan cita-cita Kemerdekaan Nasional kita, berikut substansi ekonomi konstitusi kita dalam menghadapi globalisasi. Nasionalisme dan patriotisme harus kita pegang teguh. Nasionalisme dan patriotisme bukan barang usang,21)

21) Saya kutipkan tentang paham nsionalisme yang tetap relevan dan tidak usang sebagai berikut: Dart Joan Robinson (1962): *"...The very nature of economics is rooted in nationalism...The aspirations of the developing countries are more for national independence and national self-respect than just for bread to eat...".*

Dart Leah Greenfeld (2001): *"...Today, it is claimed, we live In the period of late capitalism, and possibly in the postindustrial society, yet nationalism ...is not gone, nor does it show any signs of being gone soon...Nationalism first appeared in England, becoming the preponderant vision of society there...the sustained growth characteristic of modern economy is not self-sustained, it is stimulated and sustained by nationalism..".* Dart Ian Lustic (2002):*"...It has been a commonplace to view nationalism as the greatest, the most powerful single force in the modern world. It is indeed remarkable to consider how resilient nationalist movements are and how capable they have been in sustaining loyalities, eliciting sacrifice, and surviving prolonged failure...".*

yang terus menerus didistorsi oleh paham neo- liberalisme dan imperialism global yang predatorik, dengan skenario dongeng-dongeng fiktif yang menjerumuskan tentang *the end of nation states* dan *the borderless world,* serta tentang *the end of history* (menangnya kapitalisme terhadap sosialisme).

Tanpa patriotisme, tanpa pimpinan Negara yang ber­karakter sebagai negarawan, mustahil Indonesia bisa mem­bangun ekonomi nasionalnya sesuai dengan pesan-pesan Konstisuti di mana rakyat diposisikan sebagai sentral-sub­stansial itu. Tahta adalah milik rakyat.

Sekianlah, sekali lagi saya ucapkan Selamat ber-Dies Natalis ke-45.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

**Lampiran**

**BAGAN SES DEMOKRASI**

**(Volkssouvereiniteit/ Kedaulatan Rakyat)**

|  |  |
| --- | --- |
| Paham Barat | Paham Indonesia  (Paham Asia umumnya) |
| Dasar: Paham liberalism dan individualism *(perfect individual liberty)* | Dasar: paham kebersamaan dalam asa kekeluargaan *(mutualism dan brotherhood)* |
| Kepentingan individu adalah utama (kepentingan masyarakat tidak diabaikan-solaidaritas altruism filantropis) | Kepentingan masyarakat yang utama, bukan kepentingan orang-seorang |
| Negara terbentuk melalui kontrak sosial (**Vertrag)** dari individu bebas | Masyarakat ada sebagai *given* (manusia adalah makhluk sosial, *homo-socius*). Masyarakat membentuk konsesus sosial antara anggota-anggotanya. *Privacy is a societal license.* |
| **Perwakilan:** semua dipilih | **Perwakilan:** semua diwakili (utusan golongan/utusan daerah)  Decision making: musyawarah mufakat (demokrasi Pancasila/*consociational democracy)* |
| **Dalam kehidupan ekonomi:** “Daulat Pasar” Competitivism. Berdasar paham liberalism/ neoliberalisme, kapitalisme/ neokapitalisme, fundamentalisme pasar Smithian (*laissez-faire, invisible hand,* *Hobbesian homo-economicus.* Peran modal adalah sentral-substansial, *one share-one vote.*  Hak milik: bersifat absolute (eigendom)  Demokratisasi=nprivatisasi, liberalisasi | **Dalam kehidupan ekonomi:** “Daulat Pasar” *Cooperativism, concours, coopetition,* Berdasar paham demokrasi ekonomi (produksi dikerjakan oleh semua untuk semua, bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dst), *homo-socius, homo-ethicus.*Peran rakyat adalah sentral-sibstansial (bukan marginal-residual)  Hak milik: berfungsi sosial (meskipun hak warganegara orang-seorang dihormati, tidak diabaikan secara semena-mena).  Demokratisasi: perluasan distribusi asset, srukturalisme, triple-co (co-ownership, co-determination, co-responsibility) |
| **Adagium:** Globalisasi kompetitif (Fiksi) *the end of nation states, the borderless world, the end of history.* | **Adagium:** Globalisasi adil terkendali, utamakan kepentingan nasional tanpa abaikan tanggungjawab global, jalan lurus Pancasila (ekonomi konstitusi) |